



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

2025

LAPORAN KINERJA
Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja dimaksud sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada Tahun 2025. Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada umumnya dan DJKN pada khususnya, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025. Penyusunan LAKIN 2025 dilakukan berdasarkan hasil capaian IKU seluruh kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sesuai dengan Peta Strategis Kanwil Balinusra Tahun 2025.

Harapan kami LAKIN Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban, sebagaimana harapan pengguna layanan dalam peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dengan dilandasi oleh Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) telah mencapai pada angka 116,33%.

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan laporan akuntabilitas kinerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Denpasar, 13 Februari 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas dibidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk mampu menghadirkan sikap yang prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien yang harus selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai cerminan dari salah satu prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu perwujudan dari prinsip *good governance*.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMK nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- g. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
- i. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
- k. peklaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada level Kantor Pusat DJKN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sedangkan struktur organisasi pada Kantor Vertikal DJKN, termasuk Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, mengacu pada PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Bidang Penilaian;
- d. Bidang Piutang Negara;
- e. Bidang Lelang;
- f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara meliputi 3 provinsi yaitu :

- a. Propinsi Bali;
- b. Propinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- c. Propinsi Nusa Tenggara Timur.

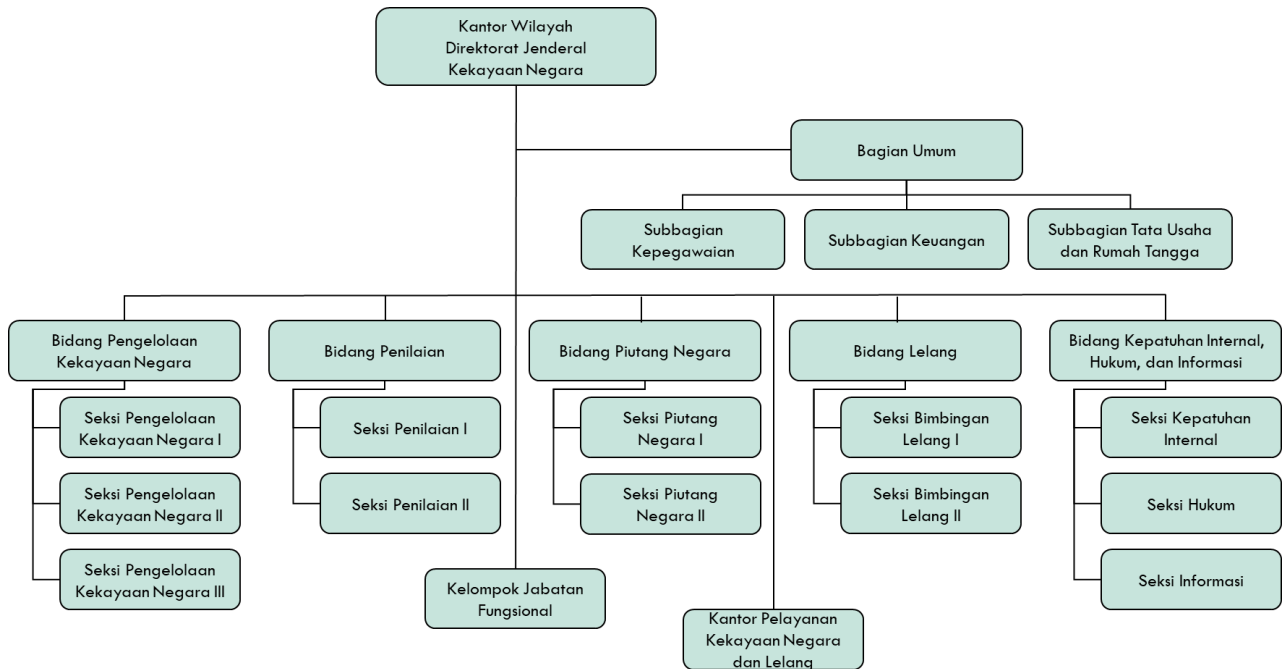
Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara membawahi 5 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu :

- a. KPKNL Denpasar;
- b. KPKNL Singaraja;
- c. KPKNL Mataram;

- d. KPKNL Bima; dan
- e. KPKNL Kupang.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat di gambarkan seperti di bawah ini:

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara



Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 192 pegawai, terdiri dari 136 pegawai pria dan 56 pegawai wanita. Adapun rincian SDM masing-masing unit yaitu pegawai Kanwil sebanyak 43 pegawai, KPKNL Denpasar sebanyak 42 pegawai, KPKNL Singaraja sebanyak 28 pegawai, KPKNL Mataram sebanyak 28 pegawai, KPKNL Bima sebanyak 22 pegawai dan KPKNL Kupang sebanyak 29 pegawai dengan komposisi berdasarkan golongan dan jenis kelamin, berdasarkan jabatan dan berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

Tabel SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara per Golongan

Satuan Kerja	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	13	3	15	9	1	2	43
KPKNL Denpasar	3	0	24	11	2	2	42
KPKNL Singaraja	2	0	15	6	2	3	28
KPKNL Mataram	2	0	14	5	1	6	28
KPKNL Bima	1	0	15	1	4	1	22
KPKNL Kupang	1	0	18	4	3	3	29

Data diambil dari aplikasi kepegawaian pada 20 Januari 2026. L= Laki-Laki, P=Perempuan.

Tabel SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara per jabatan

Satuan Kerja	Jabatan				
	Es II	Es III	Es IV	Jabatan Fungsional	Pelaksana
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	1	6	14	2	20
KPKNL Denpasar	0	1	5	13	23
KPKNL Singaraja	0	1	5	8	14
KPKNL Mataram	0	1	5	8	14
KPKNL Bima	0	1	5	4	12
KPKNL Kupang	0	1	5	7	16

Data diolah dari aplikasi kepegawaian pada 20 Januari 2026

Tabel SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sesuai pendidikan

Satuan Kerja	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D3	D1	SMU
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	0	16	16	6	2	3
KPKNL Denpasar	0	6	25	6	3	2
KPKNL Singaraja	0	3	13	8	2	2
KPKNL Mataram	0	4	18	6	0	0
KPKNL Bima	1	3	10	5	2	1
KPKNL Kupang	0	3	17	3	2	4

Data diolah dari aplikasi kepegawaian pada 20 Januari 2026

C. Peran Strategis

Sebagai unit eselon II di Lingkungan DJKN yang melaksanakan tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)

Peran Bidang PKN dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada KPKNL di lingkungan Kanwil secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, salah satu kegiatan yang menjadi kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2025 adalah kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah.

2. Bidang Penilaian

Peran Bidang Penilaian dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian,

penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian yang cepat, tepat, dan cermat di lingkungan Kanwil.

3. Bidang Piutang Negara

Peran Bidang Piutang Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara secara baik sehingga tercapai pengurusan piutang negara yang optimal.

4. Bidang Lelang

Peran Bidang Lelang dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang di lingkungan Kanwil yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Program Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Tahun 2025

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai unit vertikal dibawah DJKN, senantiasa mendukung dan melaksanakan sasaran dan agenda reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan DJKN. Beberapa implementasi sasaran dan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025, yang dapat dilihat pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara antara lain:

1. Penggunaan teknologi dalam pemberian layanan yaitu aplikasi SIMAN V2, SIPP, portal lelang (digunakan oleh KPKNL dibawah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara), serta Fokus PN (digunakan oleh bidang piutang negara dalam memonitor capaian pengelolaan pengurusan piutang negara oleh KPKNL), maupun dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dengan menggunakan aplikasi Satu Kemenkeu.

2. Peningkatan kompetensi ASN Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dengan target minimal 25 jam pelatihan tiap pegawai, guna mendukung terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi.
3. Keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM).
4. Pelaksanaan forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat guna mendukung terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

E. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja 2025 ini kami sajikan dengan sistematika laporan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis, dan sistematika laporan.
2. Bab II : Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja.
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja, kondisi dan permasalahan, upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai, serta realisasi anggaran.
4. Bab IV : Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan langkah - langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dimana berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN serta KPKNL yang berada dibawah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN, yaitu:

”Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN mempunyai sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan

mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2025-2029, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial adalah pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional
 - b. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang akuntabel
 - c. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional
 - d. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara
 - e. Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara adalah layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan, dengan arah kebijakan yaitu penguatan peran strategis layanan penilaian dan advisori untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum adalah layanan lelang yang modern dan tepercaya, dengan arah kebijakan yaitu layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

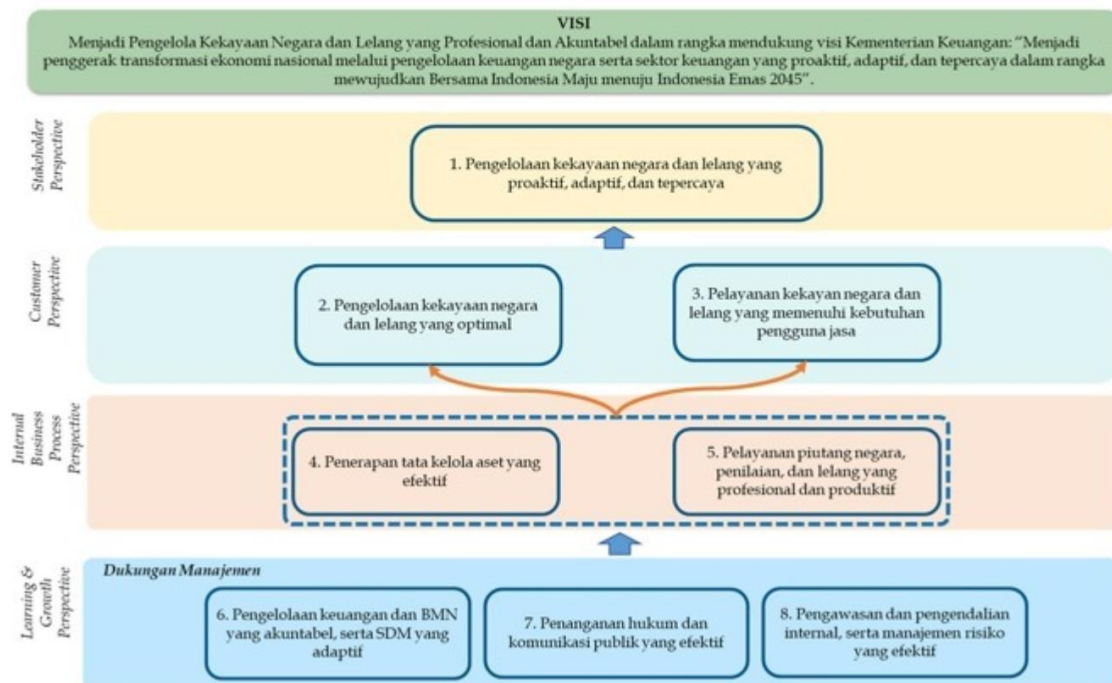
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan sasaran strategis Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Peta strategi tersebut menerapkan 4 perspektif, yaitu:

1. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder.
2. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan.
3. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan.
4. *Learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Adapun peta strategi dan perjanjian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp101,02 M)
		1b-CP	Indeks integritas	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp1,9 T)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp14,3 M)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
		3c-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Dalam tahun anggaran 2025, telah dilakukan adendum perjanjian kinerja Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan *adjustment* target *raw data* indikator kinerja "Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang" dari semula Rp101,02 M menjadi Rp111,80 M.

2. Melakukan *adjustment* target *raw data* indikator kinerja “Persentase realisasi pokok lelang” dari semula Rp1,9 T menjadi Rp2,11 T.
3. Melakukan *adjustment* target *raw data* indikator kinerja “Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara” dari semula Rp14,3 M menjadi Rp14,38 M.
4. Melakukan *adjustment* indikator kinerja “Indeks efektivitas ekosistem kehumasan” dari target semula 100 menjadi 3,55 diikuti perubahan manual IKU perhitungan realisasi/capaian.
5. Melakukan *adjustment* perubahan trajectory IKU sesuai arahan dari Kantor Pusat DJKN dan/atau akibat dari adendum perjanjian kinerja.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

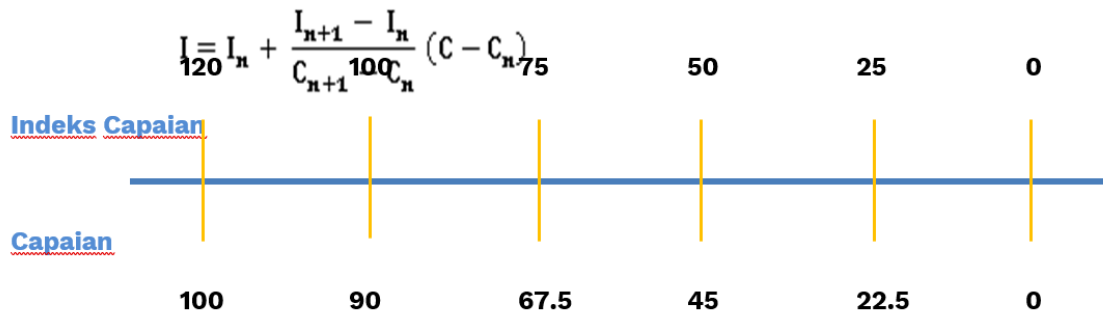
1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Maximize

$$\text{Indeks Capaian} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100 \%$$
 IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Minimize

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$
 IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

- I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
 C_a = Capaian awal
 C = Realisasi/target x 100%
 C_n = Capaian dengan ketentuan :

- Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (C - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%
- Apabila Realisasi < Target, maka :
 - C_n = Capaian awal
 - C_{n-1} = Capaian dibawahnya
 - C_{n+1} = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapakan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Dalam rangka peningkatan kualitas IKU maupun keakuratan manual IKU yang akan digunakan pada tahun 2026, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara terlebih dahulu melakukan *refinement* dengan mengacu pada indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2025. Kegiatan *refinement* dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025, dengan melibatkan seluruh bidang/bagian serta KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

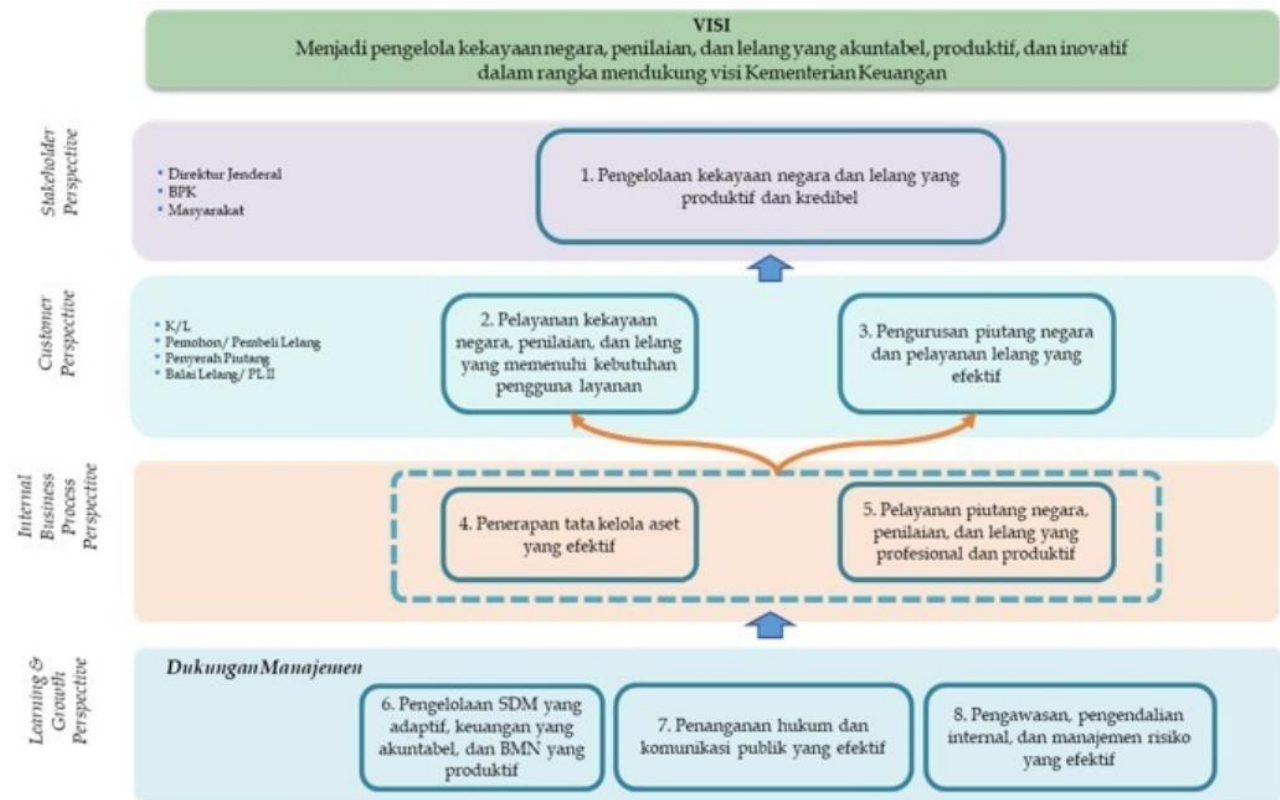
Dari hasil *refinement* IKU tersebut, dihasilkan usulan penyempurnaan terhadap 13 IKU *cascading* atau *mandatory*, 2 usulan IKU baru, serta 4 usulan raw data untuk digunakan dalam IKU tahun 2026. Selanjutnya hasil *refinement* IKU dimaksud disampaikan kepada Sekretaris DJKN melalui nota dinas tanggal 11 Desember 2025.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

mengacu pada Perjanjian Kinerja Dirjen Kekayaan Negara, yang telah dilakukan penyelarasan dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2025 – 2029, yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta visi dan misi presiden.

Detail lebih lanjut keterkaitan antara Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029, dengan RPJMN 2025 - 2029 serta visi dan misi Presiden dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029.

Adapun Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp98,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp5,5 M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp1,1 T)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 sebesar **116,33%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Perspektif	2024		2025	
	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
<i>Stakeholder</i>	30	33,17	30	33,47
<i>Customer</i>	20	23,76	20	23,34
<i>Internal Process</i>	25	28,81	25	29,73
<i>Learning & Growth</i>	25	29,75	25	29,79
TOTAL NKO		115,49		116,33

Catatan Status NKO :

NKO > 100 = Istimewa

$90 \leq \text{NKO} \leq 100$ = Baik

$70 \leq \text{NKO} < 90$ = Butuh perbaikan

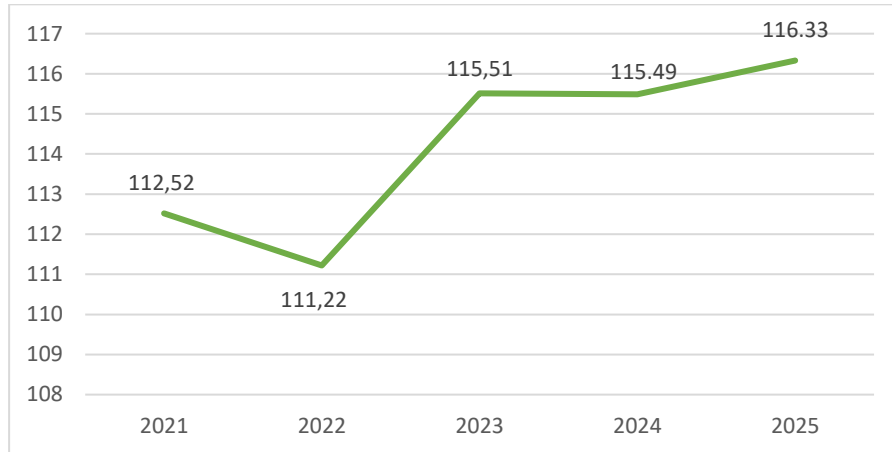
$50 \leq \text{NKO} < 70$ = Kurang

NKO < 50 = Sangat kurang

Pada tahun 2025, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dengan manajemen kinerja dan risiko yang baik, 19 IKU yang telah ditetapkan tahun 2025 tersebut dapat tercapai sama dengan/melebihi target, dengan status semua IKU berwarna hijau, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,32. Tren NKO dalam 5 tahun terakhir dan hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 dapat dilihat berikut:

Tren Kinerja NKO Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara 5 Tahun Terakhir



Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Capaian (Max. 120%)
Stakeholder Perspective (30%)					33,47%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya				111,55%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	127,89%	120%
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	100	105,32	105,32%
Customer Perspective (20%)					23,34%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				113,41%
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100%	101,97%	101,97%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100%	135,64%	120%

2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100%	140,93%	120%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				120%
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	P/M	77,00	95,82	120%
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74,00	127,49	120%
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	P/M	70,00	84,15	120%
Internal Process Perspective (25%)					29,73%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif				118,98%
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	117,95%	117,95%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100%	120,00%	120%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				118,87%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	116,60%	116,60%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	120,59%	120%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80,00%	122,01%	120%
Learning & Growth Perspective (25%)					29,79%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				120%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100,00	120,00	120%
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80,00%	100,00%	120%
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100,00	125,22	120%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				117,51%
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3,55	6,60	120%
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100,00	115,01	115,01%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				120%
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80,00	97,10	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					116,33%

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, pada tahun 2025 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara berhasil memperoleh NKO 116,32% dimana capaian dengan nilai tersebut menandakan kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2025 berhasil memenuhi ekspektasi organisasi. Penjelasan capaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelolaan kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tercapainya kondisi sasaran strategis di indikasikan dari nilai indeks integritas organisasi, indeks survey kepuasan pengguna layanan dan stakeholder, kontribusi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, serta efektivitas dari kerja sama keuangan internasional.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 2 indikator kinerja yaitu:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	SS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya			111,55%
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	127,89%	120%
	1b-CP Indeks Integritas	100	105,32	105,32%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (1a-CP) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Indikator kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang berasal dari:

1. PNBK Kekayaan Negara (PNBK Aset)
 - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada

- Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan;
- b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
2. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)
 - a. Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
 3. PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang berupa:

 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. biaya permohonan lelang;
 - d. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
 - e. uang jaminan pembeli wanprestasi;
 - f. Perijinan Balai Lelang dan PL II;
 - g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang;
 - h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II;
 - i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Adapun trajectory indikator kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusura	SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	(1a-CP) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	370,26%	232,39%	232,39%	184,18%	184,18%	127,89%	127,89%	
Capaian	370,26%	232,39%	232,39%	184,18%	184,18%	127,89%	127,89%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Rincian besarnya target dan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara (PNBPN Aset) dalam rupiah adalah sebagai berikut:

PNBPN Aset	Target	Realisasi	Persen
Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	51.807.000.000	58.501.546.420	112,92
KPKNL Denpasar	18.806.000.000	24.157.512.561	128,46
KPKNL Singaraja	3.651.000.000	3.874.545.551	106,12
KPKNL Mataram	8.665.000.000	10.072.742.681	116,25

KPKNL Bima	6.650.000.000	7.367.487.594	110,79
KPKNL Kupang	14.035.000.000	13.029.258.033	92,83

Rincian besarnya target dan realisasi penerimaan negara dari piutang negara dalam rupiah adalah sebagai berikut:

PNBP Piutang Negara	Target	Realisasi	Persen
Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	162.334.000	287.772.825	177,27
KPKNL Denpasar	130.000.000	241.871.745	186,06
KPKNL Singaraja	12.884.000	16.486.691	127,96
KPKNL Mataram	1.250.000	10.047.033	803,76
KPKNL Bima	9.000.000	10.035.729	111,51
KPKNL Kupang	9.200.000	9.331.627	101,43

Rincian besarnya target dan realisasi penerimaan negara dari lelang dalam rupiah adalah sebagai berikut:

PNBP Lelang	Target	Realisasi	Persen
Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	69.817.460.000	96.964.678.857	138,88
KPKNL Denpasar	43.203.403.000	53.812.948.086	124,56
KPKNL Singaraja	4.415.975.000	6.938.086.850	157,11
KPKNL Mataram	3.104.000.000	11.430.855.841	368,26
KPKNL Bima	7.754.082.000	10.047.416.827	129,58
KPKNL Kupang	10.996.000.000	12.925.367.040	117,55
Pejabat Lelang Kelas II	344.000.000	1.810.004.213	526,16

Dengan demikian, rincian besarnya target dan realisasi penerimaan negara (dalam rupiah) dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Total PNBP	Target	Realisasi	Persen
Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	121.786.794.000	155.753.998.102	127,89%
KPKNL Denpasar	62.139.403.000	78.212.332.392	125,87%
KPKNL Singaraja	8.079.859.000	10.829.119.092	134,03%
KPKNL Mataram	11.770.250.000	21.513.645.555	182,78%
KPKNL Bima	14.413.082.000	17.424.940.150	120,90%
KPKNL Kupang	25.040.200.000	25.963.956.700	103,69%
Pejabat Lelang Kelas II	344.000.000	1.810.004.213	526,16%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	127,89%
2024	100%	100%	100%	100%	-	131,06%

2023	100%	100%	100%	100%	-	118,62%
2022	100%	100%	100%	100%	-	117,80%
2021	100%	100%	100%	100%	-	133,77%

Pada tabel diatas, dapat dilihat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025 - 2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dicascading kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100%	125,87%	125,87%	120%
2	Singaraja	100%	134,03%	134,03%	120%
3	Mataram	100%	182,78%	182,78%	120%
4	Bima	100%	120,90%	120,90%	120%
5	Kupang	100%	103,69%	103,69%	103,69%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase realisasi penerimaan negara yang bersumber dari PNBPA Aset, dilakukan extra effort melalui penguatan kebijakan operasional, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi proses bisnis pengelolaan BMN, antara lain:

1. Melakukan penggalan potensi PNBPA Aset berbasis Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK) guna menyusun daftar prioritas aset yang memiliki potensi optimalisasi pengelolaan melalui skema pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan peran aktif KPKNL dalam penggalan potensi penerimaan negara dari PNBPA Aset yang bersumber dari pengelolaan BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) melalui percepatan tindak lanjut usulan dan penguatan koordinasi dengan satuan kerja terkait.
3. Melakukan monitoring atas penyampaian rekomendasi pengelolaan aset oleh KPKNL kepada satuan kerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja BMN, sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset.
4. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pemanfaatan BMN kepada satuan kerja dan pemangku kepentingan eksternal sebagai calon mitra, guna meningkatkan minat, partisipasi, dan realisasi pemanfaatan BMN yang berdampak pada peningkatan PNBPA Aset.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase realisasi penerimaan negara yang bersumber dari PNBPN Piutang Negara, dilakukan extra effort antara lain berupa pendampingan/asistensi kegiatan pengurusan piutang negara melalui pengurusan sederhana kepada KPKNL dalam kegiatan penagihan kepada debitur di lapangan serta koordinasi dengan penyerah piutang membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase realisasi penerimaan negara yang bersumber dari PNBPN Lelang, dilakukan extra effort antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi intensif dengan KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II melalui berbagai media komunikasi (telepon, *WhatsApp Group*, *Teams Meeting*, *Zoom Meeting*, dan lainnya) guna memastikan tercapainya target PNBPN lelang.
2. Melaksanakan koordinasi dengan para pemohon lelang, khususnya perbankan untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial laku dan nilainya signifikan, serta menetapkan nilai limit lelang secara bertahap hingga nilai likuidasi.
3. Melaksanakan penggalian potensi lelang pada *stakeholder* dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk UMKM).
4. Melaksanakan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan strategi pemasaran objek lelang.
5. Meningkatkan publikasi lelang melalui *e-Auction*, media sosial, dan laman resmi Kanwil/KPKNL.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Realisasi penerimaan negara yang bersumber dari PNBPN Aset menunjukkan capaian yang baik, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan BMN pada satuan kerja
Peningkatan pemahaman dan kesadaran satuan kerja/unit kuasa pengguna barang dalam mengelola BMN secara tertib, optimal, dan sesuai ketentuan, baik pada aspek penggunaan, pemanfaatan, maupun pemindahtanganan, mendorong peningkatan produktivitas aset dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PNBPN Aset.
2. Efektivitas dan percepatan proses layanan pengelolaan aset
Percepatan proses layanan internal, khususnya pada fungsi penilaian dan lelang, berdampak pada pemendekan siklus waktu penyelesaian pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, sehingga realisasi PNBPN Aset dapat dicapai lebih cepat.
3. Perluasan jejaring pemanfaatan BMN melalui kerja sama eksternal
Penguatan sosialisasi dan kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka memperluas

pangsa pasar pemanfaatan BMN, termasuk dengan LPEI, LMAN, dan pelaku usaha, meningkatkan peluang keberhasilan pemanfaatan aset secara optimal dan berkelanjutan.

4. Dukungan sistem informasi pengelolaan BMN

Pengembangan fitur pada aplikasi SIMAN V2, khususnya terkait pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, meningkatkan kemudahan layanan, transparansi, dan akuntabilitas proses pengelolaan aset, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan PNBPAset.

Realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPAset berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Percepatan penyelesaian berkas kasus piutang negara untuk melakukan angsuran/pelunasan dengan melakukan kegiatan penagihan kepada penanggung utang di lapangan melalui pendekatan persuasif.
2. Sinergi dengan instansi lain dan perangkat adat dalam kegiatan penagihan (antara lain pekalang, aparat desa, dukcapil, dan ATR/BPN, dan kepolisian).

Realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPAset berhasil dicapai dengan baik dikarenakan:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelayanan lelang dalam rangka mendukung perbaikan berkelanjutan (*continues improvement*).
2. Sosialisasi implementasi aplikasi lelang.go.id V2.
3. Koordinasi intensif dengan para *stakeholder* lelang.
4. Penggalan potensi lelang, termasuk lelang sukarela produk UMKM.
5. Perbaikan operasional yang membuat proses lelang lebih cepat dan efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

1. Efisiensi atas penggunaan sumber daya terkait realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPAset:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup Kanwil	14.208.000	6.730.000	Digunakan dalam rangka penelitian permohonan persetujuan pengelolaan aset.
2	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN	32.416.000	32.122.500	Kegiatan Wasdal yang intensif berdampak positif bagi capaian target PNBPAset sehingga mencapai melampaui target yang ditetapkan.

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

2. Efisiensi atas penggunaan sumber daya terkait realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengurusan / Pengelolaan Piutang Negara	23.202.000	17.462.000	Telah diselesaikan sebanyak 357 BKPN
2.	Bimbingan Teknis / sosialisasi / FGD Bidang Piutang Negara	10.134.000	10.134.000	Telah dilakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan FGD kepada petugas pengurus piutang di KPKNL serta edukom ke <i>stakeholders</i>

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

3. Efisiensi atas penggunaan sumber daya terkait realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Sosialisasi / Edukasi dibidang lelang	6.642.000	4.200.000	1. Pembinaan secara daring 2. Pembinaan terkait lelang UMKM 3. Lelang amal serta edukom
2.	Rekomendasi hasil monev serta tindak lanjut atas pelaksanaan lelang	61.505.000	57.741.203	1. Pemantauan lelang pada KPKNL dan pemantauan terhadap kegiatan Balai Lelang 2. Pemenuhan permindok BPK dengan melakukan koordinasi dengan 5 KPKNL, 4 Balai Lelang, dan 14 PL II
3.	Peningkatan kompetensi pejabat lelang	27.240.000	27.240.000	Pemeriksaan Minuta Risalah Lelang terhadap 5 KPKNL dan 14 PL II serta pemeriksaan berkala 4 Balai Lelang
4.	Penggalian potensi lelang	29.888.000	29.888.000	Penggalian potensi lelang ke Perbankan dan Pelaku UMKM
5.	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	9.104.000	9.104.000	Memproses perizinan 5 PL II (1 pindah wilayah jabatan, 4 perpanjangan)

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN aset diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif kepada KPKNL dan satuan kerja terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan aset.
2. Penggunaan SIMAN V2 dalam pengelolaan BMN yang berdampak pada semakin cepat dan

efisiennya pemberian persetujuan permohonan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN.

3. Program kerjasama dengan pihak eksternal DJKN melalui sosialisasi dalam rangka mencari mitra pemanfaatan aset.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada seksi Piutang Negara pada KPKNL.
2. Koordinasi dan sosialisasi dengan para penyerah piutang bersama-sama dengan KPKNL.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang diantaranya adalah:

1. Monitoring dan evaluasi capaian secara berkala terhadap capaian Pejabat Lelang Kelas I, Kelas II, serta Pegadaian.
2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara triwulanan.
3. Sosialisasi aplikasi/peraturan/kebijakan lelang terbaru kepada stakeholder, baik melalui tatap muka maupun daring.
4. Pembinaan lelang yang dilakukan secara intensif.
5. Penguatan kemitraan strategis dengan para *stakeholder* lelang.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN aset, terdapat risiko yaitu adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 10.

Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN.
2. Melakukan pembinaan tindak lanjut Pengelolaan BMN dan Sosialisasi Pelaksanaan Perhitungan Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan pihak lain yang terkait

Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi turun pada level 5.

Terhadap pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara, terdapat risiko yaitu banyaknya BKPN yang tidak dapat diselesaikan, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 13. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan:

1. Melakukan pembinaan kepada KPKNL secara rutin dan insidentil.
2. Koordinasi dengan satker (K/L dan Pemda) terkait penyelesaian piutang yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN/KPKNL.

Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi turun pada level 11.

Terhadap pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang, terdapat risiko yaitu potensi laku lelang cenderung rendah, yang dipetakan pada awal tahun beradap pada level 13. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya melalui pemantauan dan penggalan potensi lelang kepada pihak perbankan, serta koordinasi dan pembinaan kepada *stakeholder* dan KPKNL untuk optimalisasi potensi lelang. Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi turun pada level 11.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN aset, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu rendahnya motivasi (*awareness*) satker terhadap peningkatan PNBPN dari pengelolaan aset untuk digunakan sebagai sumber dana dalam DIPA satker, serta sistem pembayaran pemanfaatan sewa dilakukan di awal kontrak dalam hal periode lebih dari 1 tahun sehingga terdapat penurunan perolehan PNBPN pada tahun berikutnya. Untuk mengatasi hal dimaksud, dilakukan langkah-langkah yaitu koordinasi dengan KPKNL dan satuan kerja terkait potensi atas PNBPN aset.

Dalam pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Profil BKPN tanpa jaminan atau dengan jenis jaminan lain-lain dan ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikannya.
2. Penyerahan pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh penyerah piutang namun debitur dan tempat usahanya berlokasi diluar wilayah kerja KPKNL.
3. Penyerahan piutang negara yang tidak didukung dengan dokumen dan lampiran dokumen pendukung yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Pendekatan persuasif kepada debitur sehingga memperbesar potensi penyelesaian pengurusan.
2. Koordinasi dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang.
3. Komunikasi kepada penyerah piutang dan melakukan penelitian penyerahan. Apabila tidak memenuhi unsur adanya dan unsur besarnya piutang negara maka dikomunikasikan secara informal dan formal untuk penolakan penyerahan piutang.

Dalam pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu Lelang TAP karena objek lelang tidak marketable dan nilai limit objek lelang tinggi

. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan langkah – langkah, yaitu Melakukan pembinaan ke KPKNL agar meningkatkan realisasi capaian PL dan koordinasi dengan Pemohon lelang untuk memasarkan objek lelang secara lebih luas.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Indikator kinerja realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP aset mencerminkan adanya kesetaraan sosial dan dukungan terhadap masyarakat kecil yaitu:

1. Tidak adanya diskriminasi terhadap layanan pengelolaan BMN.
2. Ada dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), lembaga sosial non profit dan lain-lain melalui penyesuaian tarif sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Indikator kinerja realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP piutang negara tidak ada kaitannya secara langsung dengan isu GEDSI. Namun demikian, indikator kinerja ini berkontribusi pada kenaikan PNBP pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk mendukung program pemerintah terkait isu GEDSI.

Indikator kinerja realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP lelang telah mencerminkan perhatian terhadap isu GEDSI, diantara terlihat dalam:

1. Informasi terkait lelang disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Tersedia kanal pengaduan yang responsif untuk menampung masukan dan menyelesaikan kendala secara cepat.
3. Prinsip non-diskriminasi diterapkan dalam seluruh proses lelang, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
4. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi, peluang bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan diperkuat melalui sosialisasi yang terarah dan sesuai kebutuhan mereka.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP aset secara langsung berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden, antara lain:

1. Melakukan identifikasi dan percepatan pengelolaan BMN dalam rangka mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana nota dinas Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) nomor ND-1449/KN.02/2025 tanggal 27 Oktober 2025.
2. Mempertimbangkan pemberian faktor penyesuai terhadap permohonan sewa BMN sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Indikator kinerja realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, capaian indikator kinerja ini berkontribusi pada kenaikan PNBPN pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Indikator kinerja realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang menghasilkan PNBPN lelang, yang turut memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan pendapatan negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan layanan lelang yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta efisiensi proses. Selain itu, pelaksanaan lelang juga berperan dalam mendorong pemberdayaan pelaku UMKM dengan memberikan akses terhadap aset produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Di sisi lain, lelang turut menjamin kepastian hukum melalui eksekusi aset yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini tidak hanya memperkuat integritas sistem, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan lelang, serta meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN Aset pada tahun 2026 bisa tercapai optimal, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan pemetaan terhadap potensi optimalisasi pengelolaan aset.
2. Intensifikasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada KPKNL dan satuan kerja terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan aset.
3. Meningkatkan program kerjasama dengan pihak eksternal DJKN melalui sosialisasi dalam rangka mencari mitra pemanfaatan aset.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi (monev) capaian kinerja KPKNL agar dapat dilakukan antisipasi secara dini terhadap potensi masalah pencapaian target di bidang realisasi PNBPN Aset.

Guna menjaga capaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN Piutang Negara pada tahun 2026 bisa tercapai optimal, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan pendekatan persuasif sehingga memperbesar potensi pembayaran piutang oleh debitur.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi persuasif dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang sebelum dilakukan penyerahan kepada PUPN/KPKNL.

Guna menjaga capaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN Lelang pada tahun 2026 bisa tercapai optimal, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Koordinasi intensif dengan KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II.
2. Koordinasi dengan para pemohon lelang, khususnya perbankan guna melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial laku dan nilainya cukup besar, serta menetapkan nilai limit lelang secara bertahap hingga nilai likuidasi.
3. Penggalan potensi lelang pada stakeholder, termasuk lelang sukarela produk UMKM.
4. Koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan strategi pemasaran objek lelang.
5. Peningkatan publikasi lelang melalui e-Auction, media sosial, dan laman resmi Kanwil/KPKNL.
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelayanan lelang dalam rangka mendukung perbaikan berkelanjutan (continues improvement).
7. Sosialisasi aplikasi/peraturan/kebijakan lelang yang terbaru kepada *stakeholder*.

b. (1b-CP) Indeks Integritas

Indikator kinerja Indeks Integritas bertujuan untuk :

1. Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai atau responden internal dan pengguna layanan Kementerian Keuangan atau pengguna layanan eksternal.
2. Menjadikan *pilot project good government* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil atau *result oriented government*.

Capaian indikator kinerja Indeks Integritas pada tahun 2025 diukur berdasarkan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi sesuai dengan rencana aksi hasil SPI, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Akumulasi realisasi kegiatan s.d. triwulan tersebut}}{\text{Akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut}}$$

Pada perhitungan triwulan III, terdapat perubahan manual IKU berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-2918/KN.1/2025 yang merubah ketentuan bahwa realisasi Triwulan IV akan memperhitungkan faktor eksternal dan faktor koreksi.

Adapun *trajectory* indikator kinerja Indeks Integritas tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya							
	(1b-CP) Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP

Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	105,32	105,32	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	105,32%	105,32%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	105,32%	105,32%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	92	-	105,32
2024	89,17	92	92	92	-	92,44
2023	88,67	91,5	91,5	91,5	-	89,17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90,5	90,5	-	-	-

Pada tabel diatas, dapat dilihat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025 - 2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Indeks Integritas *dicascading* kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100	105,32	105,32%	105,32%
2	Singaraja	100	105,32	105,32%	105,32%
3	Mataram	100	105,32	105,32%	105,32%
4	Bima	100	105,32	105,32%	105,32%
5	Kupang	100	105,32	105,32%	105,32%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Integritas tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* berupa pembentukan *channel* pada aplikasi Ms Teams. Channel Ms Teams ini bermanfaat sebagai sarana koordinasi dokumentasi kegiatan pembangunan integritas dan pelaksanaan tugas kepatuhan internal lainnya di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan KPKNL yang ada dibawah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. *update* dan monitoring berkala nilai indeks setiap bulan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mewajibkan para pejabat dan pelaksana di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk mengikuti pelatihan penguatan integritas dan pencegahan korupsi
2. *Campaign* / Internalisasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara
3. Pemetaan/Identifikasi benturan kepentingan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dimaksud.
4. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pegawai pada internal unit kerjanya masing-masing.
5. Melakukan identifikasi titik rawan (Risk Profiling) praktik gratifikasi.
6. Melakukan pemantauan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi.
7. Penerbitan naskah dinas pimpinan unit kerja yang memuat imbauan pengendalian gratifikasi dan penegasan agar tidak menjamu pimpinan secara berlebihan.
8. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi dan/atau koordinasi untuk menyampaikan pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada pihak eksternal unit kerjanya masing-masing.
9. Diseminasi kebijakan dan pengelolaan SDM terkait promosi/pola mutasi di lingkungan DJKN.
10. Melaksanakan evaluasi program "Tali Kasih" khususnya terkait proses penyaluran/penggunaan dana dan efektifitas dampak program kepada pihak yang membutuhkan.
11. Pembinaan/Workshop/Sharing Session untuk meningkatkan kapasitas entitas Pengadaan Barang/Jasa.
12. Internalisasi ketentuan dan kebijakan penggunaan fasilitas kantor terutama kendaraan dinas.
13. Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan.
14. Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Pembinaan kepatuhan internal dan manajemen risiko kepada KPKNL (Rekomendasi Kepatuhan Internal)	12.030.000	10.091.761	Telah dilaksanakan: 1. Pembinaan / Sosialisasi / Diskusi kepatuhan internal dan manajemen risiko kepada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, dengan rincian 4 kegiatan dilaksanakan secara <i>online</i> dan 3 kegiatan dilaksanakan secara <i>offline</i> (KPKNL Mataram, KPKNL Kupang dan KPKNL Singaraja). 2. Kegiatan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil SPI Tahun 2024.

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja indeks integritas diantaranya adalah melibatkan masyarakat/*stakeholder* untuk berkontribusi dalam menjaga integritas pegawai Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, diantaranya dengan:

1. Melaksanakan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum yang dikemas dalam bentuk kegiatan jalan santai.
2. Pembuatan surat himbauan kepada *stakeholder* untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
3. Sosialisasi saluran pengaduan kepada masyarakat/*stakeholder*, baik melalui kegiatan tatap muka, *website*, medsos, serta APT.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu adanya pegawai yang melakukan pelanggaran integritas, diantaranya melakukan pungutan liar (pungli), atau melakukan tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau Audit Investigasi oleh Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI). Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya:

1. Penguatan Pimpinan sebagai role model.
2. Pelaksanaan pelaporan gratifikasi secara berkala pada setiap bulan.
3. Melakukan pengawasan dan pemantauan pegawai secara berkala melalui pemantauan kode etik dan perilaku secara berkala sesuai setiap bulan dan pelaporan dilaksanakan pada Triwulanan.
4. Pelaksanaan profiling bagi seluruh pegawai.

5. Internalisasi penguatan budaya integritas kepada seluruh pegawai (*integrity sharing*).
6. Desiminasi tolak dan lapor gratifikasi (melalui website/medsos/instagram Kanwil dan APT). Kegiatan penguatan integritas dilakukan sepanjang tahun karena integritas merupakan nilai dasar yang perlu dimiliki oleh setiap jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2025, kendala yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei, yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu optimalisasi UKI selaku lini pertahanan kedua untuk senantiasa melakukan penguatan integritas dan budaya anti korupsi, diantaranya melalui:

- a. *Integrity sharing* dengan narasumber Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
- b. Sosialisasi nilai – nilai integritas, anti korupsi, serta tolak dan lapor gratifikasi kepada pihak internal maupun eksternal melalui *website*, media sosial, *running text*, banner, TV APT, dan dalam kegiatan tatap muka, baik oleh pimpinan unit maupun oleh penyuluh anti korupsi pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
- c. Pembinaan kepatuhan internal dan manajemen risiko kepada KPKNL.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator kinerja ini mendukung terwujudnya kesetaraan dalam pemberian layanan. Dengan pegawai yang berintegritas, maka masyarakat dapat mendapatkan layanan yang selalu optimal sesuai dengan ketentuan, tanpa membedakan faktor gender, disabilitas maupun status sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, indikator kinerja ini membantu mewujudkan pegawai Kementerian Keuangan yang berintegritas dalam pelaksanaan APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Indeks Integritas pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Senantiasa melakukan aksi kolaboratif dalam melaksanakan serangkaian rencana aksi atas hasil SPI tahun 2025 serta program penguatan integritas sepanjang tahun 2026.
2. Mempertahankan kolaborasi/sinergi dalam rangka penguatan integritas yang telah dilakukan oleh seluruh lini pada tahun 2025.

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 3 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				113,41%
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	101,97%	101,97%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	135,64%	120%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	138,62%	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (2a-CP) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Indikator kinerja ini terdiri dari 2 sub komponen yaitu:

1. Nilai Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset

Nilai Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset diukur dengan metode sebagai berikut:

a. Tahap Pengujian NUP BMN Target

$$x = \frac{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil optimalisasi (b)}}{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil pengukuran (a)}}$$

Keterangan:

X = Hasil pengujian awal

(a) = Merupakan target kegiatan, yang merupakan BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya < 50 %

(b) = Merupakan hasil optimalisasi atas BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya < 50 %

Catatan Tahap Pengujian Awal NUP Target:

- a. Pengujian tingkat kesesuaian menggunakan formulir pendataan dan formulir perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
 2. Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujiannya menghasilkan > 1", NUP target tersebut dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi.
 3. Terhadap NUP target yang "hasil pengujiannya menghasilkan < 1", NUP target tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi. NUP target dimaksud merupakan objek pembinaan guna meningkatkan tingkat optimalisasi.
- b. Tahap Perhitungan Optimalisasi

Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujian menghasilkan > 1" dilakukan perhitungan tingkat optimalisasinya, dengan formula dan pembobotan:

- a. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Penggunaan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian:
 - a) Penggunaan Sendiri:
 - * 1 kegiatan penggunaan sendiri senilai 20% dari 5 --> 1
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 50% dari 5 --> 2,5
 - b) Penggunaan Sementara: 50% dari 5 --> 2,5 (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan penggunaan sementara berikutnya.
 - c) Penggunaan Bersama: 50% dari 5 --> 2,5 (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan penggunaan bersama K/L ke-2, ke-3, dst pada pelaksanaan berikutnya.

- b. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Pemanfaatan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian:
- a) Sewa dan/atau Pinjam Pakai:
 - * 1 kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 60% dari 5 --> 3
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 100% dari 5 --> 5
 - b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) / Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) / Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) / Kerja Sama Terbatas Pembiayaan Infrastruktur (Ketupi) bernilai 100% dari 5 --> 5

Catatan Tahap Perhitungan Optimalisasi:

1. Pemberian capaian dengan mekanisme Penggunaan BMN dengan bentuk penggunaan sendiri dapat dilakukan beberapa kali, dengan pembobotan:
 - * 1 kegiatan penggunaan sendiri senilai 20% dari 5 --> 1
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 50% dari 5 --> 2,5
(contoh mengadakan 2 Ruang, yaitu Ruang Laktasi dan Ruang bermain anak pengguna layanan, maka nilainya adalah 50% dari bobot 5, yaitu 2,5);
2. Pemberian capaian dengan mekanisme Penggunaan BMN dengan bentuk penggunaan sementara dan penggunaan bersama dapat dilakukan beberapa kali sepanjang dasar pelaksanaannya berasal dari surat persetujuan yang berbeda (surat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. KPKNL) dan diberlakukan kelipatan capaian.
3. Pemberian capaian dengan mekanisme Pemanfaatan BMN Sewa dan/atau Pinjam Pakai dapat dilakukan beberapa kali sepanjang dasar pelaksanaan pemanfaatan tersebut berasal dari surat persetujuan yang berbeda (surat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. KPKNL), dengan pembobotan capaian:
 - * 1 kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 60% dari 5 --> 3
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 100% dari 5 --> 5

c. Tahap Perhitungan Capaian Optimalisasi BMN

Capaian Optimalisasi BMN dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\left[\frac{(\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan}) + (\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan})}{3} \right] \times 100\%$$

Obyek target yaitu tanah kantor dan/atau bangunan/gedung kantor pada satker Kementerian/Lembaga target tahun berjalan.

2. Penyelesaian Pengukuran Optimalisasi Pengelolaan Aset

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi subkomponen penyelesaian pengukuran optimalisasi pengelolaan aset adalah: Jumlah NUP selesai diukur ÷ Jumlah NUP target triwulan.

Selanjutnya perhitungan realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara dilakukan sebagai berikut:

Realisasi IKU = (Sub Komponen 1 x 80%) + (Sub Komponen 2 x 20%)

Adapun *trajectory* indikator kinerja tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	111,46%	82,01%	82,01%	97,95%	97,95%	101,97%	101,97%	
Capaian	222,92%	136,68%	136,68%	122,43%	122,43%	101,97%	101,97%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	101,97%	101,97%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	101,97%
2024	100%	-	-	-	-	130,76%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Pada tabel diatas, dapat dilihat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025 - 2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Optimalisasi Pengelolaan Aset *dicascading* kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100	100,34	100,34%	100,34%
2	Singaraja	100	111,11	111,11%	111,11%
3	Mataram	100	127,56	120,00%	120,00%
4	Bima	100	117,28	117,28%	117,28%
5	Kupang	100	100,21	100,21%	100,21%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* berupa koordinasi dan pendampingan terhadap satker target, untuk mengedukasi dan mengidentifikasi potensi optimalisasi terhadap aset yang menjadi target.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan edukasi dan koordinasi pada satker target
2. Melakukan monev capaian secara periodik
3. Melakukan pembinaan/sosialisasi/diskusi optimalisasi pengelolaan aset.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan dalam pencapaian indikator kinerja tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara. Pelaksanaan kegiatan - kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan Bidang PKN yang lainnya, sehingga secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara diantaranya adalah:

1. Data pada aplikasi SIMAN BMN sudah divalidasi sehingga mempermudah pengukuran.
2. Dukungan terhadap pemenuhan kantor sebagai dampak pembentukan kabinet merah putih, antara lain melalui optimalisasi aset diantaranya penggunaan bersama terhadap aset yang masih belum optimal.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu risiko rekomendasi optimalisasi tidak ditindaklanjuti oleh Satker, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 10. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada Satker. Dengan demikian diproyeksikan risiko tersebut akan menjadi turun pada level 5.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya perbedaan karakteristik target antara unit vertikal (persentase) dan Kantor Pusat (jumlah NUP). Guna mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan konsultasi dengan Kantor Pusat serta bimbingan teknis dengan stakeholder.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator kinerja ini telah mencerminkan adanya kesetaraan sosial dan dukungan terhadap masyarakat kecil, yang salah satunya dapat dilihat pada optimalisasi BMN melalui mekanisme pemanfaatan BMN, khususnya sewa, yaitu:

1. Tidak adanya diskriminasi terhadap layanan pengelolaan BMN.
2. Ada dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), lembaga sosial non profit dan lain-lain melalui penyesuaian tarif sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, capaian indikator kinerja ini dapat mencerminkan adanya indikator efisiensi terhadap kebutuhan anggaran untuk pemenuhan gedung kantor baru sebagai dampak pembentukan kabinet merah putih dengan salah satu mekanisme optimalisasi pengelolaan aset yaitu penggunaan bersama. Selain itu capaian indikator kinerja ini dapat berkontribusi untuk mendorong peningkatan penerimaan PNPB dengan optimalnya pengelolaan aset, sehingga belanja negara dapat lebih fokus dalam mendukung Program Prioritas Presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tetap tinggi pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Berkoordinasi dengan satker target untuk menggali potensi optimalisasi aset.
2. Berkoordinasi dengan satker untuk mengedukasi potensi penggunaan bersama terhadap aset.
3. Melakukan pembinaan/sosialisasi/diskusi terhadap indikator kinerja tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.

b. (2b-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap

target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II) / (Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PLII). IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Adapun trajectory indikator kinerja persentase realisasi pokok lelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	353,33%	253,69%	253,69%	185,78%	185,78%	135,64%	135,64%	
Capaian	353,33%	253,69%	253,69%	185,78%	185,78%	135,64%	135,64%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Rincian realisasi pokok lelang adalah sebagai berikut:

Pokok Lelang	Target	Realisasi	Persen
Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	2.176.235.587.000	2.951.930.886.594	135,64
KPKNL Denpasar	1.050.583.235.000	1.318.957.814.612	125,55
KPKNL Singaraja	131.000.000.000	175.611.020.119	134,05
KPKNL Mataram	141.604.834.000	309.217.313.239	218,37
KPKNL Bima	272.719.528.000	292.757.517.034	107,35
KPKNL Kupang	450.000.000.000	555.318.090.266	123,40
Pejabat Lelang Kelas II	130.327.990.000	300.069.131.324	230,24

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	135,64%
2024	100%	-	100%	-	-	138,60%
2023	100%	-	100%	100%*	-	108,66%
2022	100%	-	100%	100%*	-	107,18%
2021	100%	-	100%	100%*	-	162,34%

*Sumber: LAKIN DJKN 2023

Pada tabel diatas, dapat dilihat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025 - 2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang *dicascading* kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100%	125,55%	125,55%	120%
2	Singaraja	100%	134,05%	134,05%	120%
3	Mataram	100%	218,37%	218,37%	120%
4	Bima	100%	107,35%	107,35%	107,35%
5	Kupang	100%	123,40%	123,40%	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase realisasi pokok lelang, telah dilakukan *extra effort*, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi intensif dengan KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II melalui berbagai media komunikasi (telepon, WhatsApp Group, Teams Meeting, Zoom Meeting, dan lainnya) guna memastikan tercapainya target pokok lelang.
2. Melaksanakan koordinasi dengan para pemohon lelang, khususnya perbankan untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial laku dan nilainya signifikan, serta menetapkan nilai limit lelang secara bertahap hingga nilai likuidasi.
3. Melaksanakan penggalian potensi lelang pada *stakeholder* dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk UMKM).
4. Melaksanakan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan strategi pemasaran objek lelang.
5. Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media sosial, dan laman resmi

Kanwil/KPKNL.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Realisasi pokok lelang berhasil dicapai dengan baik dikarenakan:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelayanan lelang dalam rangka mendukung perbaikan berkelanjutan (*continues improvement*).
2. Sosialisasi implementasi aplikasi lelang.go.id V2.
3. Koordinasi intensif dengan para *stakeholder* lelang.
4. Penggalian potensi lelang, termasuk lelang sukarela produk UMKM.
5. Perbaikan operasional yang membuat proses lelang lebih cepat dan efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Sosialisasi/edukasi dibidang lelang	6.642.000	4.200.000	1. Pembinaan secara daring 2. Pembinaan terkait lelang UMKM 3. Lelang amal serta edukom
2.	Rekomendasi hasil monev serta tindak lanjut atas pelaksanaan lelang	61.505.000	57.741.203	1. Pemantauan lelang pada KPKNL dan pemantauan terhadap kegiatan Balai Lelang 2. Pemenuhan permindok BPK dengan melakukan koordinasi dengan 5 KPKNL, 4 Balai Lelang, dan 14 PL II
3.	Peningkatan kompetensi pejabat lelang	27.240.000	27.240.000	Pemeriksaan Minuta Risalah Lelang terhadap 5 KPKNL dan 14 PL II serta pemeriksaan berkala 4 Balai Lelang
4.	Penggalian potensi lelang	29.888.000	29.888.000	Penggalian potensi lelang ke Perbankan dan Pelaku UMKM
5.	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	9.104.000	9.104.000	Memproses perizinan 5 PL II (1 pindah wilayah jabatan, 4 perpanjangan)

Ket: anggaran/kegiatan ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja realisasi pokok lelang di antaranya meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi capaian secara berkala terhadap capaian Pejabat Lelang Kelas I, Kelas II, serta Pegadaian.
2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara triwulanan.
3. Sosialisasi aplikasi/peraturan/kebijakan lelang terbaru kepada stakeholder, baik melalui tatap

muka maupun daring.

4. Pembinaan lelang yang dilakukan secara intensif.
5. Penguatan kemitraan strategis dengan para *stakeholder* lelang.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, terdapat risiko berupa pembatalan lelang yang pada awal tahun dipetakan berada pada level 11. Untuk mengurangi risiko tersebut, telah dilakukan langkah mitigasi, antara lain pembinaan kepada KPKNL guna meningkatkan realisasi pokok lelang, koordinasi dengan perbankan, serta penggalan potensi lelang kepada UMKM. Dengan upaya tersebut, risiko diproyeksikan menurun menjadi turun pada level 10.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu jumlah permohonan pelaksanaan lelang bersifat fluktuatif. Terkait hal tersebut, telah dilakukan pembinaan ke KPKNL agar meningkatkan realisasi capaian pokok lelang serta koordinasi sekaligus penggalan potensi lelang kepada Stakeholder.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Untuk memastikan partisipasi yang setara, materi publikasi lelang disusun dengan bahasa yang sederhana dan ramah pembaca, serta didukung oleh aksesibilitas digital. Selain itu, disediakan kanal pengaduan yang responsif untuk menampung masukan dan menyelesaikan kendala secara cepat. Prinsip non-diskriminasi diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses lelang. Hal ini menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa adanya perlakuan berbeda. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi, lelang juga diarahkan untuk membuka peluang pemanfaatan aset produktif bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan. Upaya ini diperkuat melalui sosialisasi yang terarah dan sesuai kebutuhan, sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan lelang secara optimal. Pendekatan inklusif ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong pemerataan akses terhadap aset produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, Sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan pendapatan negara, dilakukan peningkatan kualitas layanan lelang yang transparan dan akuntabel. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi dan integritas dalam setiap proses. Layanan lelang juga diarahkan untuk mendorong pemberdayaan pelaku UMKM dan peningkatan investasi

melalui kemudahan akses terhadap aset produktif.

Dengan membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM dan kelompok rentan, diharapkan tercipta pemerataan ekonomi dan peningkatan daya saing usaha kecil di pasar. Sebagai langkah strategis menuju transformasi digital, proses lelang terus dikembangkan agar lebih modern dan berbasis teknologi. Digitalisasi ini bertujuan untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga mendukung terciptanya layanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan dilakukannya hal – hal tersebut, akan lebih banyak masyarakat yang menggunakan lelang sebagai sarana jual - beli, sehingga berkontribusi terhadap kenaikan PNBP pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Untuk terus meningkatkan capaian realisasi pokok lelang, rencana aksi yang akan dilakukan meliputi:

1. Koordinasi intensif dengan KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II.
2. Koordinasi dengan para pemohon lelang, khususnya perbankan guna melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial laku dan nilainya cukup besar, serta menetapkan nilai limit lelang secara bertahap hingga nilai likuidasi.
3. Penggalan potensi lelang pada stakeholder, termasuk lelang sukarela produk UMKM.
4. Koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan strategi pemasaran objek lelang.
5. Peningkatan publikasi lelang melalui e-Auction, media sosial, dan laman resmi Kanwil/KPKNL.
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelayanan lelang dalam rangka mendukung perbaikan berkelanjutan (continues improvement).
7. Sosialisasi aplikasi/peraturan/kebijakan lelang yang terbaru kepada *stakeholder*.

c. (2c-CP) Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PND/ Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-

tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);

2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;
Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :
 1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
 2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
 3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Adapun trajectory indikator kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (2c-CP) Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	141,67%	80,31%	80,31%	145,01%	145,01%	138,62%	138,62%		
Capaian	141,67%	80,31%	80,31%	145,01%	145,01%	138,62%	138,62%		
Nilai Kinerja	120%	80,31%	80,31%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Rincian *raw data* target dan realisasi Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara dalam rupiah adalah sebagai berikut:

PNBP Lelang	Target	Realisasi	Persen
Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	14.626.023.000	20.275.095.429	138,62%
KPKNL Denpasar	13.287.092.000	18.672.006.669	140,53%
KPKNL Singaraja	160.000.000	196.308.319	122,69%
KPKNL Mataram	180.000.000	265.188.438	147,33%
KPKNL Bima	509.931.000	551.895.611	108,23%
KPKNL Kupang	489.000.000	589.696.392	120,59%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	-	-	138,62%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Indikator kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara *dicascading* kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100%	138,62%	138,62%	120%
2	Singaraja	100%	122,69%	122,69%	120%
3	Mataram	100%	147,33%	147,33%	120%
4	Bima	100%	108,23%	108,23%	108,23%
5	Kupang	100%	120,59%	120,59%	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara tahun 2025, telah dilakukan extra effort berupa pendampingan/ asistensi kegiatan pengurusan piutang negara melalui pengurusan sederhana kepada KPKNL dalam kegiatan penagihan kepada debitur di lapangan serta koordinasi dengan penyerah piutang membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Percepatan penyelesaian berkas kasus piutang negara untuk melakukan angsuran/pelunasan.
2. Terhadap penanggung yang tidak ada kemampuan untuk membayar atau tidak diketahui

keberadaannya segera diarahkan untuk dilakukan PSBDT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	23.202.000	17.462.000	Telah disusun / dihasilkan penyelesaian sebanyak 357 BKPN
2.	Bimbingan Teknis/ sosialisasi/ FGD Bidang Piutang Negara	10.134.000	10.134.000	Telah dilakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan FGD kepada petugas pengurus piutang di KPKNL serta edukom ke <i>stakeholders</i>

Ket: anggaran/kegiatan ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada seksi Piutang Negara pada KPKNL.
2. Koordinasi dan sosialisasi dengan para penyerah piutang bersama-sama dengan KPKNL.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 11. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko, diantaranya dengan:

1. Koordinasi, Monev Berkala, Bimbingan Teknis, Pembinaan Langsung, atau melalui media komunikasi lainnya, dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan, menyusun strategi serta memberikan solusi penyelesaiannya.
2. Meminta Prognosa kepada KPKNL dalam upaya memenuhi Target Realisasi Capaian Kinerja.
3. Melakukan pemantauan progres perkembangan upaya KPKNL, dan memastikan realisasi yang dicapai minimal sesuai Target dalam setiap tahapan Triwulannya.

Dengan demikian diproyeksikan risiko tersebut akan menjadi turun pada level 10.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu

mendapatkan perhatian yaitu:

1. Profil BKPN tanpa jaminan atau dengan jenis jaminan lain-lain dan ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikannya.
2. Penyerahan pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh penyerah piutang namun debitur dan tempat usahanya berlokasi diluar wilayah kerja KPKNL.
3. Penyerahan piutang negara yang tidak didukung dengan dokumen dan lampiran dokumen pendukung yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Pendekatan persuasif kepada debitur sehingga memperbesar potensi penyelesaian pengurusan.
2. Koordinasi dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang.
3. Komunikasi kepada penyerah piutang dan melakukan penelitian penyerahan. Apabila tidak memenuhi unsur adanya dan unsur besarnya piutang negara maka dikomunikasikan secara informal dan formal untuk penolakan penyerahan piutang.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Indikator kinerja ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan isu GEDSI. Namun demikian, capaian indikator kinerja ini mendukung terwujudnya data piutang negara yang handal, serta apabila ada pembayaran piutang akan berkontribusi pada kenaikan PNBPN pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk mendukung program pemerintah terkait isu GEDSI.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, capaian indikator kinerja ini mendukung terwujudnya data piutang negara yang handal, serta apabila ada pembayaran piutang akan berkontribusi pada kenaikan PNBPN pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan pendekatan persuasif sehingga memperbesar potensi penyelesaian pengurusan.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi persuasif dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang sebelum dilakukan penyerahan kepada PUPN/KPKNL.

3. Sasaran Strategis: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 3 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				120%
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,82	120%
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	127,49	120%
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	84,15	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (3a-N) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Komponen yang diukur antara lain:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana

- 8. Sarana Prasarana
- 9. Sarana Pengaduan

Hasil Survei dituangkan dalam perhitungan berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Formula perhitungan nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kanwil adalah rata-rata indeks hasil survei kepuasan pengguna layanan yang berasal dari pelayanan KPKNL yang ada dibawahnya.

Adapun trajectory indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 3: Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa (3a-N) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	77	Max/ Avg
Realisasi	95,13	96,36	95,74	95,89	95,79	95,92	95,82	95,82	
Capaian	123,5%	125,1%	124,33%	124,53%	124,40%	124,57	124,44	124,44	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	4,20	4,20	4,20	-	95,82
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Pada tabel diatas, dapat dilihat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025 - 2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, serta rencana kerja

Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Sesuai dengan kode IKU pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang ada di kontrak kinerja KPKNL, IKU ini statusnya tidak *cascading* kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Namun demikian, indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ada di KPKNL dan nilai realisasinya digunakan untuk menghitung nilai realisasi pada Kanwil. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	77	94,2	122,33%	120%
2	Singaraja	77	95	123,37%	120%
3	Mataram	77	95	123,37%	120%
4	Bima	77	98	127,27%	120%
5	Kupang	77	97,4	126,49%	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* berupa penggunaan formulir e-SKPL yang disediakan oleh Kantor Pusat DJKN. Dengan menggunakan formulir ini, responden cukup mengisi satu kali survei, dan KPKNL mendapatkan tiga nilai yaitu nilai SKM, nilai aspek E-Services, dan nilai IPAK.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan publikasi standar pelayanan, yang diantaranya memuat prosedur layanan, waktu layanan, biaya layanan, dan dokumen persyaratan. Publikasi dilakukan melalui ruang APT dan masing-masing media sosial (Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta KPKNL dibawahnya).
2. Penerapan Kepdirjen KN nomor KEP-40/KN/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi di Lingkungan DJKN, yang diantaranya mengatur standar layanan yang diberikan oleh petugas APT.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terkait indikator kinerja ini tidak terdapat alokasi sumber dana tertentu dalam anggaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dengan demikian, secara umum terjadi efisiensi

penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2025 diantaranya adalah penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Dengan demikian, pengguna jasa tidak perlu hadir fisik ke KPKNL untuk mendapatkan layanan.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu terjadinya kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 11. Kesalahan prosedur atau dokumen ini dikhawatirkan dapat mengurangi kepuasan pengguna layanan. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko untuk menurunkan kemungkinan keterjadiannya, di antaranya dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan / bimbingan teknis pada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi rendah pada level 10.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu pengguna jasa enggan dan/atau lupa mengisi survei. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pendekatan persuasif kepada pengguna jasa yang enggan mengisi, publikasi hasil SKM/SKPL melalui media sosial, serta melakukan tindak lanjut perbaikan. Dengan demikian diharapkan pengguna jasa merasakan dampak dari perbaikan yang dilakukan dan berkenan mengisi survei untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator kinerja ini mencerminkan komitmen DJKN untuk memberikan layanan yang terbaik dalam seluruh layanan dan perhatian kepada disabilitas. Dalam formulir survei, apabila pengguna jasa menjawab bahwa yang bersangkutan merupakan disabilitas, maka akan muncul pertanyaan spesifik yang mengukur kepuasan kaum disabilitas. Selain itu, pada akhir survei, terdapat kolom jawaban terbuka yang memungkinkan pengguna jasa menyampaikan aspirasinya terkait dengan layanan yang diberikan oleh DJKN.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, dengan kepuasan layanan yang tinggi, diharapkan masyarakat lebih sering menggunakan layanan dari KPKNL, yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kenaikan PNBPN pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan dan menyusun laporan SKM/SKPL triwulanan.
2. Menyusun rencana aksi perbaikan dari unsur SKM/SKPL yang mendapatkan nilai paling rendah.
3. Melakukan monitoring atas tindak lanjut rencana aksi yang telah disusun pada periode survei sebelumnya.

b. (3b-N) Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terdiri dari empat komponen yaitu:

No	Nama Komponen	Target				Keterangan
		Q1	Q2	Q3	Q4	
1.	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN	74	74	74	74	Hanya di Kanwil, tidak <i>dicascade</i> ke KPKNL
2.	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Jafung Pelelang	74	74	74	74	Wajib <i>dicascade</i> kepada Kepala KPKNL dan seluruh PF Pelelang
3.	Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian	74	74	74	74	Hanya di Kanwil (wajib <i>cascade</i> ke Kabid Penilaian), tidak <i>dicascade</i> ke KPKNL
4.	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Pengelolaan Piutang Negara	74	74	74	74	Wajib <i>dicascade</i> kepada Kepala KPKNL dan Kasi PN di KPKNL

Adapun realisasi Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi adalah rata – rata dari empat komponen tersebut diatas.

Adapun trajectory indikator kinerja Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	(3b-N) Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/Avg
Realisasi	176,79	109,98	143,39	108,94	131,91	114,23	127,49	
Capaian	238,9%	148,6%	193,7%	177,6%	178,2%	154,36%	172,28%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Rincian realisasi tiap komponen dalam Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Komponen	Realisasi			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1.	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN (selanjutnya disebut Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi BMN)	405,41	78	83	98
2.	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Jafung Pelelang (selanjutnya disebut Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi Lelang)	80	120	120	120
3.	Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian (selanjutnya disebut Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi Penilaian)	121,76	116,15	110,68	116,47
4.	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Pengelolaan Piutang Negara (selanjutnya disebut Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi Piutang Negara)	100	125,77	122,09	122,44
Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi		176,79	143,39	108,94	114,23

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	-	-	-	127,49
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi juga dicascading kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target

dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	74	93,43	126,25%	120%
2	Singaraja	74	94,05	127,09%	120%
3	Mataram	74	92,43	124,91%	120%
4	Bima	74	96,39	130,25%	120%
5	Kupang	74	100,03	135,17%	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan BMN, telah dilakukan *extra effort*, antara lain bekerja sama dengan KPKNL untuk melakukan kegiatan pelatihan SIMAN V2 secara offline di lima kabupaten dan secara hybrid.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi lelang, telah dilakukan extra effort, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi prosedur dan manfaat lelang kepada *stakeholder* dan masyarakat melalui webinar, tatap muka, dan media daring.
2. Mengembangkan konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti video tutorial, infografis, dan artikel di media sosial serta laman resmi kantor.
3. Membentuk grup komunikasi interaktif (Whatsapp Group) untuk menjawab pertanyaan dan memberikan pendampingan kepada stakeholder.
4. Melakukan kampanye publikasi melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan kolaborasi dengan instansi terkait.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi penilaian, telah dilakukan extra effort, antara lain:

1. Melakukan upaya percepatan pelaksanaan sosialisasi, dengan menjadwalkan sosialisasi tingkat Kanwil segera setelah undangan sosialisasi dari Kantor Pusat dhi. Direktorat Penilaian diterima, dengan berkoordinasi sebelumnya dengan para Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN dan KPKNL guna memastikan kehadiran para peserta dan pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam rentang 1 s.d. 5 hari kerja kemudian.
2. Melakukan *post-test* Intensif dengan pemberian simulasi terlebih dahulu atau *pre-test* kepada para Penilai Pemerintah di lingkungan Kanwil dan KPKNL untuk memastikan rata-rata nilai ujian peserta mencapai atau mendekati skor maksimal.
3. Melakukan *group discussion* untuk mendalami materi yang menjadi tema sosialisasi sebelum ujian dilaksanakan pada akhir sesi sosialisasi.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi piutang negara, telah dilakukan extra effort, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan piutang negara yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait pengelolaan piutang negara (meliputi : penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban) yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah serta penyerah piutang dari Lembaga *Sui Generis* sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.
2. Melakukan pendampingan koordinasi terkait percepatan PPNTD (Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal) terhadap berkas piutang macet yang telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
3. Melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara/Daerah sebagai sarana bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola piutang sehingga terwujud tata kelola piutang yang lebih baik.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan BMN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membuat perencanaan dan penjadwalkan pelaksanaan kegiatan edukom.
2. Menunjuk pegawai yang berkompeten untuk menjadi narasumber.
3. Menyediakan sesi tanya jawab untuk membantu peserta mengatasi kesulitan terkait pengelolaan BMN

Target indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Materi edukasi disajikan dengan bahasa sederhana dan visual yang menarik, sehingga mudah dipahami oleh pengguna layanan dan masyarakat.
2. Pemanfaatan teknologi digital (media sosial, aplikasi lelang.go.id V2) memperluas jangkauan informasi.
3. Respons cepat terhadap pertanyaan dan pengaduan melalui kanal komunikasi resmi meningkatkan kepercayaan publik.
4. Kolaborasi dengan *stakeholder* memperkuat penyebaran informasi dan edukasi.

Target indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi penilaian berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi yang cepat dan tepat waktu antara Kanwil DJKN dan KPKNL dalam hal waktu pelaksanaan sosialisasi yang memungkinkan seluruh peserta para Penilai Pemerintah dapat

menghadiri kegiatan, sehingga kuorum waktu dan peserta dapat terpenuhi.

2. Penggunaan metode daring (online) yang memungkinkan kegiatan sosialisasi dilakukan segera tanpa kendala, lebih fleksibel tidak terikat jadwal fisik, hemat biaya, dapat diakses secara mudah, efisiensi waktu, mendukung kemandirian maupun kreativitas, dan memiliki daya jangkau yang lebih luas sehingga dapat mendukung pencapaian indeks kecepatan waktu.
3. Materi ketentuan peraturan yang akan disampaikan melalui kegiatan sosialisasi sebelumnya telah dipelajari lebih awal oleh para Penilai Pemerintah melalui self-learning.
4. Menyediakan grup khusus para Penilai Pemerintah sebagai wahana dan sarana penunjang diskusi mengenai berbagai teknis ketentuan peraturan dan kendala atau permasalahan yang ditemui.

Target indikator kinerja indeks efektivitas edukasi dan komunikasi piutang negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyusun perencanaan dan penjadwalkan pelaksanaan kegiatan edukom yang dituangkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan tujuan untuk membangun komunikasi efektif sehingga terjadi interaksi dua arah secara langsung serta membina hubungan baik dan persamaan persepsi antara PUPN/DJKN dengan penyerah piutang dalam pengelolaan piutang negara yang baik.
3. Melaksanakan koordinasi dengan KPKNL dalam rangka optimalisasi pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga dengan melakukan pendampingan percepatan penerbitan PPNTD atas piutang yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Pengelolaan BMN

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	7.892.000	7.597.857	Telah dilaksanakan delapan kali pembinaan pengelolaan BMN dan tujuh kali pelaksanaan pembinaan implementasi SIMAN V2, baik secara offline, online, dan hybrid.

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

2. Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Lelang

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Sosialisasi/edukasi dibidang lelang	6.642.000	4.200.000	1. Pembinaan secara daring 2. Pembinaan terkait lelang UMKM 3. Lelang amal serta edukom

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

3. Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Penilaian

Untuk mencapai Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi di bidang Penilaian, tidak terdapat alokasi anggaran tersendiri yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, karena terkena efisiensi. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi dilakukan secara *online*. Dengan demikian, telah tercermin efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

4. Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Piutang Negara

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Bimbingan Teknis/ sosialisasi/ FGD Bidang Piutang Negara	10.134.000	10.134.000	Telah dilakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan FGD kepada petugas pengurus piutang di KPKNL, edukom ke <i>stakeholders</i> , serta pendampingan percepatan penerbitan PPNTO ke <i>stakeholders</i>

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari penggunaan anggaran diatas, mampu menghasilkan realisasi yang melebihi target. Dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terlampaui.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi efektivitas edukasi dan komunikasi di antaranya meliputi:

1. Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Pengelolaan BMN

Hal - hal yang menunjang keberhasilan efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan BMN adalah aktifnya komunikasi antara Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, KPKNL, serta satuan kerja binaanya. Dengan demikian rencana kegiatan sosialisasi dapat terinfokan dengan baik dan dihadiri oleh perwakilan satuan kerja.

2. Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Lelang

- a. Sosialisasi secara berkala mengenai prosedur lelang dan kebijakan terbaru kepada masyarakat dan stakeholder.
- b. Pembuatan konten edukasi digital (video, infografis, artikel) yang diunggah di media

sosial dan laman resmi.

- c. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terkait pemahaman informasi lelang.
 - d. Kemitraan dengan pemohon lelang untuk publikasi informasi lelang.
3. Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Penilaian
- Program/Kegiatan Penunjang Program yang menunjang keberhasilan IKU Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian adalah program Knowledge Sharing rutin yang diadakan secara internal oleh Bidang Penilaian dan adanya forum Penilai Pemerintah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (seperti Morning Call atau Gugus Kendali Mutu) yang menjadi ajang pemanasan sebelum pelaksanaan sosialisasi formal.
4. Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Piutang Negara
- Efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang negara merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan *stakeholders* dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui audiensi dan konsultasi/kunjungan/sosialisasi/workshop/*Focus Group Discussion* atau metode lainnya yang dilaksanakan.
- Adapun materi yang disampaikan terkait kegiatan edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang, seperti:
- a. Tata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah;
 - b. Pengurusan piutang Negara;
 - c. Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh PUPN;
 - d. Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga Negara; dan/atau
 - e. Materi lain terkait pengelolaan piutang.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu waktu pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan pelaksanaan tugas yang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, diantaranya merencanakan jadwal pelaksanaan edukom dengan memperhatikan pelaksanaan tugas yang lain.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu adanya potensi ketidaktepatan, ketidaksinkronan, maupun keterlambatan penyampaian informasi kepada pengguna layanan dan masyarakat. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko untuk menurunkan kemungkinan keterjadiannya, di antaranya dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala, serta menyampaikan *update* ketentuan/peraturan terbaru. Dengan demikian diharapkan

informasi yang diterima oleh pengguna layanan dan/atau masyarakat merupakan informasi terkini.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator kinerja ini mencerminkan adanya komitmen dari DJKN untuk mewujudkan adanya kesetaraan dalam mendapatkan kegiatan edukasi dan komunikasi terkait tugas dan fungsi DJKN kepada para pengguna jasanya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan GEDSI.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, diharapkan pengguna jasa tidak ragu dalam menggunakan layanan dari DJKN/KPKNL, yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kenaikan PNPB pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan pembinaan kepada KPKNL.
2. Melaksanakan sosialisasi dan monev pelaksanaan edukom kepada pengguna jasa.
3. Mengukur tingkat pemahaman peserta melalui survei.

(3c-N) Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara dan berkaitan dengan Butir-Butir Rakernas Tahun 2023 yang mendorong pengembangan fungsi DJKN sebagai *Asset Advisory* bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta menindaklanjuti rekomendasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) kegiatan "DJKN Mendengar" yang meyampaikan peran penting DJKN sebagai Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, menegaskan profesi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah) -selanjutnya disingkat K/L dan Pemda- perlu dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai kegiatan Bimbingan Teknis).

Hal ini menjadi krusial mengingat latar pendidikan bagi para Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna tidak seluruhnya berasal dari pendidikan terkait Penilaian yang telah dibekali dengan standar penilaian yang berlaku di dunia penilaian. Diharapkan pada masa mendatang, Kanwil DJKN sebagai unit vertikal DJKN menjadi ujung tombak yang akan melaksanakan percepatan bimbingan teknis guna menciptakan penguatan ekosistem Penilai Pemerintah, khususnya untuk Penilai Pemerintah pada instansi pengguna.

Para Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna (K/L dan Pemda) dituntut pula untuk memiliki bekal atau modal yang standar guna melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, perlu kiranya segera dilaksanakan.

Pada tahun 2025, aktivitas pelaksanaan penilaian di lingkungan Instansi Pengguna (K/L dan Pemda) semakin bertambah seiring dengan berkurangnya permohonan penilaian dari Instansi Pengguna ke DJKN, selain jenis objek penilaian pun akan semakin bervariasi sesuai dengan aset yang dikelola pada masing-masing Instansi Pengguna. Pertambahan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, diproyeksikan akan meningkat pula mengingat kebutuhan Penilai di Instansi Pengguna semakin menguat sehingga memerlukan peran unit vertikal DJKN dalam meningkatkan kapasitas kompetensi Penilai Pemerintah.

Kegiatan bimbingan teknis penilaian yang merupakan upaya pembinaan dari DJKN dan unit vertikal DJKN, antara lain berupa:

1. Pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) atau koordinasi dalam rangka persiapan bimbingan teknis dengan Direktorat Penilaian;
2. Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna berupa pendampingan dari Penilai Pemerintah DJKN dalam pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna;
3. Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna berupa penelaahan konsep laporan penilaian oleh Penilai Pemerintah DJKN melalui kegiatan pemaparan (*peer review*) yang disampaikan Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna dan Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah DJKN atas Laporan Penilaian yang telah disusun Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna;
4. Verifikasi Kompetensi bagi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna yang diadakan melalui 2 (dua) bentuk yaitu pemaparan atas laporan penilaian yang telah dilaksanakan dan ujian tertulis secara serentak. Kegiatan verifikasi kompetensi tersebut dilakukan terpusat oleh Kantor Pusat DJKN kecuali pelaksanaan verifikasi kompetensi dalam bentuk Uji Pemaparan yang melibatkan pula Bidang Penilaian Kanwil DJKN dan Penilai Pemerintah Ahli Madya/Madya DJKN. Peserta verifikasi kompetensi pada tahun 2025 menyasar kepada Penilai Pemerintah pada Pemerintah Daerah.
5. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penilaian dan pengembangan kompetensi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna.

Dalam rangka meningkatkan tugas pembinaan serta pengembangan kompetensi di bidang

Penilaian, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan hasil verifikasi kompetensi Penilai Pemerintah DJKN dan Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna yang berada di wilayah kerjanya.
2. Direktorat Penilaian melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa verifikasi kompetensi dapat diikuti dan dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna.

Laporan kegiatan bimbingan teknis Penilaian sebagai bagian dari pembinaan profesi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna wajib disampaikan resmi secara berkala triwulanan kepada Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi serta Direktorat Penilaian.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Indikator kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah ini mengukur tingkat keberhasilan peningkatan kapasitas kompetensi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna (K/L dan Pemda). Indikator kinerja tersebut didasari peran DJKN sebagai Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, yang mana DJKN beserta Kanwil DJKN bertanggung jawab melaksanakan bimbingan teknis guna menciptakan penguatan ekosistem Penilai Pemerintah dan menjamin kualitas hasil penilaian sesuai dengan standar yang berlaku. Sasaran utamanya adalah untuk memastikan sumber daya manusia Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna (Kementerian/Lembaga dan Pemda) memiliki kompetensi teknis yang mumpuni sesuai level jabatannya, yang diukur melalui Verifikasi Kompetensi (Quality Assurance) dan keikutsertaan dalam berbagai bentuk bimbingan teknis.

Pengukuran indikator kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah menggunakan komponen gabungan antara hasil ujian Verifikasi Kompetensi dan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek), dengan formula:

Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah
<i>(40% x Rata-rata Nilai Verkom Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna) + (60% x Tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN)</i>

Namun dalam hal pada triwulan berjalan belum dilaksanakan uji verifikasi kompetensi, maka formulasi perhitungan menjadi:

Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah
<i>(100% x Tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN)</i>

Untuk perhitungan tingkat keberhasilan bimbingan teknis berdasarkan nilai dasar terselenggaranya bimbingan teknis sebesar 80. Nilai dasar tersebut selanjutnya dikalikan dengan Indeks Pengali sesuai dengan jenis kegiatan yang diadakan Kanwil DJKN, yaitu:

1. Kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) atau pelaksanaan koordinasi dalam rangka

- persiapan bimbingan teknis dengan Direktorat Penilaian, Indeks pengali 1 (Nilai 80).
2. Pelaksanaan Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna atau kegiatan praktik penilaian yang melibatkan Penilai Pemerintah instansi Pengguna dalam Pelaksanaan Penilaian yang dilakukan Penilai Pemerintah DJKN, Indeks pengali 1,1 (Nilai 88).
 3. Pelaksanaan penelahaan konsep laporan penilaian oleh Penilai Pemerintah DJKN melalui kegiatan pemaparan (*peer review*) dan Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah DJKN, dengan Indeks pengali sebesar 1,2 (Nilai 96).

Adapun trajectory indikator kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa (3c-N) Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	70	Max/TK
Realisasi	96	96	96	96	96	96	84,15	84,15	
Capaian	137,14%	137,14%	137,14%	137,14%	137,14%	137,14%	120,21%	120,21%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70	-	-	-	-	84,15
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

IKU Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah merupakan indikator kinerja yang mengalami perubahan pada tahun 2025, dari sisi penamaan maupun formulasi perhitungan sehingga terhitung sebagai IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Pada tahun 2023, IKU ini dinamai IKU Indeks Hasil Verifikasi Kompetensi Penilai yang berada di Perjanjian Kinerja *Kemenkeu Three*, memiliki target 72 dengan konsolidasi periode *Take Last*

Known, polarisasi *Maximize*, periode pelaporan Tahunan dan hanya memperhitungkan nilai verifikasi kompetensi Penilai Pemerintah DJKN, dengan peserta Penilai Pemerintah DJKN diantaranya Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP), Pejabat struktural di Bidang Penilaian yang merupakan Penilai Pemerintah yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan, dikecualikan Penilai Pemerintah DJKN yang memangku jabatan struktural Eselon III ke atas.

Selanjutnya pada tahun 2024, indikator kinerja ini mengalami perubahan nama menjadi IKU Peningkatan Kapasitas Penilai Pemerintah melalui Bimbingan Teknis Penilaian dan adanya perubahan target menjadi 70, konsolidasi periode *Average*, polarisasi *Maximize*, periode pelaporan Triwulanan. Perubahan tersebut disertai pula formulasi pengukuran yang disempurnakan dengan menghitung pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN berikut nilai verifikasi kompetensi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, yang dikhususkan pada Penilai Pemerintah di pemerintah daerah.

Untuk tahun 2025, indikator kinerja kembali mengalami perubahan menjadi IKU Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah dan menjadi salah satu IKU *mandatory* bagi pemilik peta strategis di Perjanjian Kinerja *Kemenkeu Two*. Penyempurnaan formulasi dilakukan dengan mengubah konsolidasi periode menjadi *Take Last Known*, sedangkan polarisasi tetap *Maximize*, periode pelaporan Triwulanan, dan target kinerja sebesar 70.

Fungsi strategis mengenai peran DJKN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah menjadi hal yang perlu senantiasa dikembangkan pada masa mendatang sehingga indikator kinerja yang mengukur kompetensi Penilai Pemerintah khususnya pada Instansi Pengguna harus disempurnakan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, indikator kinerja ini menjadi salah satu IKU *mandatory* dalam Perjanjian Kinerja pemilik peta strategis *Kemenkeu Two*, yang menandakan peran Kanwil DJKN selaku unit vertikal DJKN di daerah sebagai *leader* pembinaan profesi Penilai Pemerintah semakin diperlukan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah tidak *dicascading* kepada KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dengan demikian tidak ada perbandingan capaian kinerja antara Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dengan KPKNL terkait indikator kinerja ini.

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk meraih target maksimal, strategi *extra effort* difokuskan pada variabel yang dapat dikendalikan dalam hal ini pelaksanaan bimbingan teknis dan mempersiapkan variabel yang sulit dikendalikan yaitu nilai hasil verifikasi kompetensi. Upaya tersebut dapat dirincikan sebagai

berikut:

1. Pemilihan jenis bimbingan teknis yang memiliki indeks bernilai tinggi, dengan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan mendorong pelaksanaan penelaahan konsep laporan penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN/KPKNL melalui kegiatan pemaparan (*peer review*) dan Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN.
2. Mendorong Penilai Pemerintah untuk mengikuti pra verifikasi kompetensi dengan melakukan uji coba latihan menjawab soal atau bedah kasus pelaksanaan penilaian sebelum agenda pelaksanaan verifikasi kompetensi Uji Tertulis dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN.
3. Mempersiapkan pelaksanaan verifikasi kompetensi di masing-masing wilayah kerja dimana Penilai Pemerintah pada Pemerintah Daerah berada dan melakukan pendataan Penilai Pemerintah untuk mengikuti kegiatan verifikasi kompetensi agar seluruh Penilai dapat mengikuti kegiatan dimaksud.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena faktor penentu antara lain:

1. Kualitas Penyelenggaraan bimbingan teknis, dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan atas materi relevan yang akan disampaikan berikut narasumber yang kompeten saat pelaksanaan bimbingan teknis melalui Forum Group Discussion (FGD).
2. Mendorong kehadiran dan partisipasi aktif dari para Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan verifikasi kompetensi.
3. Meminta keterlibatan dari para Penilai Pemerintah DJKN yang berada di KPKNL sesuai wilayah kerja masing-masing untuk membantu pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penelaahan konsep laporan penilaian melalui kegiatan pemaparan (*peer review*) yang berdampak langsung terhadap pemahaman para Penilai Pemerintah terkait pelaksanaan penilaian dan standar laporan penilaian.

Namun demikian perlu juga diperhatikan hal – hal yang berpotensi menyebabkan capaian kinerja tidak tercapai, yaitu:

1. Kegiatan pembinaan PFPP pada instansi pengguna belum diimbangi dengan anggaran dan jumlah SDM yang memadai.
2. Kemungkinan rendahnya nilai hasil verifikasi kompetensi melalui Uji Tertulis.

Mengingat latar belakang pendidikan Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna tidak semua berasal dari pendidikan terkait penilaian dan ketidaksamaan tingkat pemahaman mengenai standar, prosedur dan tahapan penilaian, dimungkinkan nilai hasil verifikasi kompetensi melalui Uji Tertulis yang diperoleh akan rendah.

3. Kesalahan strategi dalam hal penjadwalan kegiatan bimbingan teknis melalui Forum Group Discussion (FGD) yang tidak dihadiri oleh para Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna.
4. Adanya pelaksanaan penilaian yang dilakukan para Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, tidak sesuai dengan tahapan dan prosedur penilaian sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak terdapat alokasi anggaran tersendiri yang terkait dengan pelaksanaan indikator kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah, karena terkena efisiensi. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi dilakukan secara *online*. Dengan demikian, telah tercermin efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah tahun 2025 meliputi lima aktivitas utama yaitu:

1. *Forum Group Discussion* (FGD).
2. Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah bagi Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna.
3. Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian berupa pelaksanaan penelaahan konsep laporan penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN/KPKNL melalui kegiatan pemaparan (*peer review*) dan Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN.
4. Verifikasi Kompetensi melalui Uji Pemaparan dan Uji Tertulis
5. Monitoring dan Evaluasi.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terkait indikator kinerja ini, terdapat risiko yaitu adanya kesenjangan (*gap*) kompetensi yang lebar pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna. Terkait hal tersebut, telah dilakukan mitigasi, antara lain:

1. Menyusun materi bimbingan teknis yang disesuaikan dengan level kompetensi dasar sebelum memasuki materi lanjutan yang bersifat lebih kompleks.
2. Melakukan *pre-test* sebelum bimbingan teknis diadakan untuk mengukur kesiapan peserta sebelum mengikuti kegiatan verifikasi kompetensi.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya efisiensi anggaran (anggaran diblokir), sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi menggunakan media daring (*online*). Menyikapi hal tersebut, dilakukan upaya, antara lain:

1. Kolaborasi dengan Instansi Pengguna dengan menyelenggarakan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh Instansi Pengguna dimana Penilai Pemerintah berada sehingga tidak menggunakan anggaran Kanwil DJKN.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis secara daring/*online* yang memungkinkan kegiatan dilakukan tanpa kendala dan lebih fleksibel tidak terikat jadwal fisik serta dapat diakses secara mudah, guna mendukung kemandirian maupun kreativitas.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator kinerja ini mencerminkan adanya kesetaraan akses peningkatan kompetensi dan karir bagi seluruh Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna (termasuk di wilayah 3T di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) tanpa memandang gender atau latar belakang, untuk memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi penilaian yang sama.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, Peningkatan kompetensi Penilai Pemerintah pada Pemerintah Daerah mendukung program Kemandirian Fiskal Daerah yang bertujuan agar Penilai Pemerintah pada Pemerintah Daerah mampu dan kompeten membantu Pemda masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan serta Barang Milik Daerah (BMD) diantaranya termasuk penilaian kembali atau revaluasi Barang Milik Daerah (BMD) dan penilaian untuk tujuan Pemanfaatan atau Pemindahtanganan yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan daerahnya, sehingga secara tidak langsung mendukung pemerataan ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan pemetaan jadwal verifikasi kompetensi baik melalui Uji Pemaparan maupun Uji Tertulis yang diadakan oleh Kantor Pusat DJKN agar selaras dengan jadwal kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN.
2. Memprioritaskan pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian berupa pelaksanaan penelaahan konsep laporan penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN/KPKNL melalui kegiatan pemaparan (*peer review*) dan Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN.
3. Mendorong pembentukan dan penguatan forum Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna sebagai wadah untuk saling berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) secara mandiri.
4. Pembinaan teknis kegiatan di bidang Penilaian secara berkala kepada JF Penilai Instansi

Pengguna melalui FGD/bimbingan teknis/sosialisasi baik secara luring/offline maupun secara daring/online.

5. Meminta dukungan KPKNL dan PFPP DJKN di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, baik secara formal melalui nota dinas tertulis maupun secara informal melalui media whatsapp dan diskusi, guna mendukung upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara antara lain penyelenggaraan FGD/Bimtek, keterlibatan Penilai Pemerintah pada instansi pengguna/non DJKN dalam pelaksanaan penilaian oleh PFPP DJKN, dan/atau kegiatan pemaparan maupun asistensi dari PFPP DJKN terhadap pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh PFPP pada instansi pengguna/non DJKN.
6. Melakukan pemantauan pengelolaan kinerja dan pengelolaan basis data (database) JF Penilai.
7. Mendorong implementasi JF Penilai dan pengembangan karier bagi PFPP eksisting, dengan cara menjaring potensi implementasi JF Penilai pada Instansi Pengguna melalui sosialisasi.
8. Menyusun laporan pembinaan JF Penilai kepada Direktorat TSI secara berkala.

4. Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. Pengurusan piutang negara; dan
3. Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

1. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle);
2. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating);
3. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum);
4. Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif				118,98%
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	117,95%	117,95%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (4a-CP) Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN

berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, *update* dan validasi di SIMAN (K4).

IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

Adapun capaian indikator kinerja ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{output K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}}{\sum \text{target sertipikasi}} \times 100\%$$

Penjelasan output adalah sebagai berikut:

No	Output	Penjelasan Output
1.	K1 (SHP elektronik, <i>update</i> dan validasi di SIMAN)	KPKNL mendorong satker untuk Sertifikasi BMN K/L dan Kontraktor KKKS (SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Barang) dan Kontraktor PKP2B untuk Aset BMN PKP2B untuk pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas dan PKP2B untuk segera mengajukan pensertipikatan, selanjut SHP yang sudah terbit diupload oleh satuan kerja ke SIMAN serta data dan informasi diinput. Upload-an SHP dan inputan data dan informasi (a.l. luas, atas nama) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPKNL melalui menu valserah.
2.	K2 (dokumen yuridis untuk kelengkapan pensertipikatan)	Kelengkapan dokumen pensertipikatan dimaksud, dibuktikan dengan: 1. tanda terima penyerahan berkas ke kantah; 2. surat kesepakatan satker/Kontraktor KKKS (BMN Hulu Migas)/SKK Migas/Kontraktor BMN PKP2B/KPKNL dengan kantah bahwa dokumen sudah lengkap dan dapat disertipikatan; atau 3. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa dokumen yuridis telah lengkap sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1)
3.	K3 (upaya pengosongan / penguasaan secara fisik oleh KL/satker (mediasi, gugatan, atau laporan ke APH)	1. Mediasi dilakukan antara satuan kerja/KL, pihak ketiga yang menguasai, KPKNL, Kontraktor KKKS /SKK Migas/ Kontraktor BMN PKP2B, dan/atau melibatkan kantor desa dan/atau aparat setempat; 2. Bukti gugatan/penanganan perkara secara optimal atau laporan ke APH; atau 3. Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa bidang tanah telah <i>clean and clear</i> sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1).

4.	K4 (ganti nama menjadi Pemerintah RI c.q. KL, <i>update</i> dan validasi di SIMAN)	Merupakan bidang tanah yg sudah bersertipikat a.n. Pemri c.q. KL namun belum di <i>update</i> di SIMAN atau bidang tanah yang masih Bersertikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) yg dilakukan ganti nama, <i>update</i> , dan validasi di SIMAN.
----	--	---

Adapun trajectory indikator kinerja Persentase BMN berupa Tanah yang disertipatkan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 4: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif (4a-CP) Persentase BMN berupa Tanah yang disertipatkan							PoI/KP
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/Tik
Realisasi	9,88%	49,48%	49,48%	84,60%	84,60%	117,95%	117,95%	
Capaian	197,6%	123,7%	123,7%	141%	141%	117,95%	117,95%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	117,95%	117,95%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Rincian capaian indikator kinerja Persentase BMN berupa Tanah yang disertipatkan adalah sebagai berikut:

No	KANWIL DJKN/KPKNL	TARGET SERTIPIKASI BMN & KKKS TA 2025					TOTAL CAPAIAN											
		K1	K2	K3	K4	TOTAL TARGET	K1					K2	K3	K4	CAPAIAN	% CAPAIAN TAHUNAN		
1	2	3	4	5	6	8 = 3+4+5+6	P0	P1	P2	P3	P4	P5	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	15 = 13/8
14	BALINUSRA	21	9	1619	0	1649	0	0	0	11	0	46	1	814	1084	1945	117,95%	
14101	Denpasar	12	0	429	0	441	0	0	11	0	33	0	123	378	534	121,09%		
14102	Singaraja	1	0	267	0	268	0	0	0	0	0	2	0	116	156	274	102,24%	
14103	Mataram	6	5	271	0	282	0	0	0	0	0	6	1	152	181	340	120,57%	
14104	Bima	2	4	253	0	259	0	0	0	0	0	2	0	178	134	314	121,24%	
14105	Kupang	0	0	399	0	399	0	0	0	0	0	3	0	245	235	483	121,05%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	117,95%
2024	100%	-	100%	-	-	108,36%
2023	100%	-	100%	100%	-	109,95%
2022	100%	-	100%	100%	-	104,60%
2021	100%	-	100%	-	-	103,30%

Pada tabel diatas, dapat dilihat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025 - 2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan dicascading kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100%	121,09%	121,09%	120%
2	Singaraja	100%	102,24%	102,24%	102,24%
3	Mataram	100%	120,57%	120,57%	120%
4	Bima	100%	121,24%	121,24%	120%
5	Kupang	100%	121,05%	121,05%	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* berupa pembentukan Kelompok Kerja Program Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Tingkat Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2025, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tingkat Wilayah Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Tahun 2025.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi yang baik antara para pihak yang terlibat dalam program pensertipikatan BMN berupa tanah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
2. *Update* dan validasi data pada bidang tanah yang telah bersertipikat pada Valserah SIMAN V2 sebagai capaian pada K4 sejumlah 1.084 (seribu delapan puluh empat) bidang tanah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	9.561.000	9.013.100	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi.
2.	Koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) dan K/L	223,800,000	221.400.000	Telah dibentuk kelompok kerja tingkat wilayah program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2025, yang didalamnya terdapat perwakilan dari Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja Kanwil

				DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
3.	Penyusunan Daftar Nominatif dan Indikatif	29,176,000	26.680.332	Telah dilakukan pembahasan usulan target indikatif sertipikasi BMN tahun 2026.

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah merupakan kegiatan yang bersifat kolaboratif antara Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, Kanwil DJKN dan KPKNL selaku perpanjangan Pengelola Barang, dan Kantor Pertanahan sebagai pelaksana sertipikasi. Secara umum aktivitas yang kami lakukan dalam kegiatan sertipikasi ini adalah:

- a. Penyusunan daftar nominatif dan indikatif yang dilakukan secara berjenjang diawali koordinasi antara KPKNL dengan K/L di wilayah kerja Bali dan Nusa Tenggara. Koordinasi tersebut menghasilkan daftar nominatif dan indikatif tanah yang akan masuk dalam rencana pensertipikatan. Daftar tersebut dirinci menurut kelompok K1, K2, K3, dan K4 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- b. Konsolidasi atas daftar nominatif dan indikatif untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara oleh Kanwil. Konsolidasi tersebut melibatkan proses koordinasi dan konfirmasi guna memastikan bidang tanah yang diusulkan telah dikelompokkan secara tepat. Selain itu, aktivitas koordinasi dan konfirmasi bertujuan agar bidang tanah yang diusulkan memang telah siap untuk dilaksanakan pensertipikatan.
- c. Penyampaian daftar usulan sertipikasi kepada Kanwil BPN Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT. Jumlah yang diusulkan dapat diubah oleh Kanwil BPN sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan anggaran di tiap-tiap Kanwil.
- d. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan K/L serta pembinaan ke KPKNL secara berkelanjutan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi, membandingkan perencanaan dan perkembangan realisasi serta memetakan kebutuhan revisi atau perubahan target/objek akibat dinamika yang terjadi dan ditemukan di lapangan.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Indikator kinerja ini terkait dengan risiko BMN berupa tanah tidak dilengkapi dokumen kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai) yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 13. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko untuk menurunkan kemungkinan keterjadiannya, di antaranya dengan melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN, KPKNL, Satuan Kerja, aparatur pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait. Dengan demikian diproyeksikan

risiko akan menjadi turun pada level 10.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dinamika pada saat proses pensertipikatan terlihat dari beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain kekuranglengkapan dokumen, serta terkendala sertipikat induk belum dipecah. Guna mengatasi hal dimaksud telah dilakukan optimalisasi capaian beberapa objek K3, dan adanya capaian pada K4, dengan melakukan *update* dan validasi data terhadap 1.084 (seribu delapan puluh empat) bidang tanah yang telah bersertipikat pada Valserah SIMAN V2, serta melakukan koordinasi dengan pihak BPN dan unit satuan kerja.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator kinerja ini tidak memiliki keterkaitan secara langsung terhadap isu GEDSI. Namun demikian indikator kinerja ini mencerminkan adanya kesetaraan dalam hukum, dimana pemerintah selaku pemilik BMN berupa tanah juga perlu melengkapi bukti kepemilikan aset yang berbentuk tanah.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, capaian indikator kinerja ini mencerminkan adanya kepastian hukum atas kepemilikan BMN berupa tanah. Dengan demikian, dapat mencegah hilangnya BMN berupa tanah akibat perbuatan melawan hukum, menghasilkan *cost saving*, serta penggunaan APBN dapat lebih untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Agar capaian kinerja Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan pada tahun 2026 tetap optimal, terdapat beberapa rencana aksi yang perlu dilakukan yaitu:

1. Melakukan identifikasi permasalahan terhadap bidang tanah yang akan dilakukan sertifikasi.
2. Melakukan pembinaan ke KPKNL dan/atau koordinasi dengan satuan kerja dan BPN.

b. (4b-N) Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN. Hasil evaluasi kinerja beserta rekomendasi perbaikan pengelolaan aset disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB). Penyampaian rekomendasi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance*

measurement melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi, atau sarana komunikatif lainnya.

Terhadap rekomendasi tersebut, PB/KPB melakukan tindak lanjut dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001. KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan, dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, evaluasi kinerja dapat dilakukan kembali pada tahun 2025.

Capaian tindak lanjut rekomendasi Evaluasi Kinerja BMN (komponen B) tidak hanya diukur dari penyampaian surat balasan satuan kerja, tetapi juga harus didukung oleh bukti tindak lanjut yang nyata dan terverifikasi. Bukti tindak lanjut disesuaikan dengan jenis rekomendasi yang diberikan.

Rekomendasi pemeliharaan ditindaklanjuti dengan penyampaian surat balasan yang dilampiri bukti pelaksanaan pemeliharaan, antara lain berupa POK. Rekomendasi pemanfaatan atau pemindahtanganan ditindaklanjuti dengan surat balasan yang dilampiri surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan Pengelola Barang. Sementara itu, rekomendasi penyerahan BMN kepada Pengelola Barang ditindaklanjuti dengan surat balasan yang dilampiri surat pernyataan Pengguna Barang.

Formula perhitungan indikator kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN adalah sebagai berikut:

Formula:		
Komponen	Formula	Satuan
Komponen A (maksimal 120%) =	(Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya/ Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya)	NUP
Komponen B (maksimal 120%) =	(Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/ Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker)	NUP
Capaian = (Komponen A x 50%) + (Komponen B x 50%)		
Komponen A memiliki target penyelesaian sebesar 100% , sementara itu Komponen B memiliki target penyelesaian sebesar 5% dari target komponen A		

Adapun *trajectory* indikator kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 4: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif (4b-N) Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/Tik
Realisasi	118,90%	108,47%	108,47%	111,44%	111,44%	120%	120%	

Capaian	792,66%	216,94%	216,94%	148,58%	148,58%	120%	120%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	
2025	100%	-	-	-	120%
2024	100%	-	100%	-	108,36%
2023	100%	-	100%	100%	109,95%
2022	100%	-	100%	100%	104,60%
2021	100%	-	100%	-	103,30%

Untuk tahun 2025, tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja persentase evaluasi kinerja BMN dicascading kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100%	124,47%	124,47%	120%
2	Singaraja	100%	120%	120%	120%
3	Mataram	100%	120%	120%	120%
4	Bima	100%	120%	120%	120%
5	Kupang	100%	120%	120%	120%

Upaya *extra effort* yang Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Formula penghitungan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2025 terdiri atas dua komponen:

1. Komponen A: jumlah aset yang dievaluasi kerjanya dan telah disampaikan rekomendasinya.
2. Komponen B: jumlah hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja (satker).

Dibanding Komponen A, pencapaian Komponen B memerlukan upaya yang lebih intensif karena tindak lanjut rekomendasi berada pada kendali satker. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan monitoring atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti serta menyampaikan

hasil monitoring kepada KPKNL untuk mendorong satker segera menindaklanjuti rekomendasi.

2. Berkoordinasi dengan koordinator wilayah (korwil) kementerian/lembaga guna mendorong satker binaan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi kinerja.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Target indikator kinerja dicapai karena didukung oleh pelaksanaan langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan kompetensi petugas survei pada KPKNL guna memastikan survei terlaksana cepat, tepat, dan akurat.
2. Monitoring dan evaluasi capaian evaluasi kinerja aset (portofolio aset) secara rutin.
3. Koordinasi yang efektif antara Kanwil DJKN, KPKNL, korwil satker, dan satker sehingga potensi kendala dapat diantisipasi lebih dini.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset). Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan Bidang PKN lainnya, sehingga secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian persentase evaluasi kinerja BMN antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi capaian target masing-masing KPKNL.
2. Koordinasi dengan KPKNL, korwil satker, dan satker untuk percepatan penyelesaian target serta penanganan kendala/permasalahan.

Analisis Mitigasi Risiko dalam Pencapaian Kinerja

Risiko yang diidentifikasi pada awal tahun adalah Evaluasi Kinerja BMN tidak dapat diimplementasikan secara efektif, dengan tingkat risiko level 11. Mitigasi dilakukan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, antara lain melalui koordinasi dengan Direktorat TSI. Bukti mitigasi risiko: ND 1054/WKN.14/2025 tanggal 7 November 2025 dan ND-1148/WKN.14/2025 tanggal 4 Desember 2025. Dengan mitigasi tersebut, risiko diproyeksikan menurun menjadi level 10 (rendah).

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya perubahan struktur organisasi pada K/L yang mengindikasikan adanya perubahan peruntukan aset. Terkait hal tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Kantor Pusat DJKN.

Analisis Keterkaitan dengan Isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan pengukuran kinerja aset secara sistematis dengan mempertimbangkan enam indikator: kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana aset memberikan manfaat bagi kepentingan umum, dan manfaat sosial, tanpa membedakan status sosial, gender, maupun disabilitas.

Analisis Dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendukung Program Prioritas Presiden karena hasil evaluasi memberikan informasi mengenai kelayakan dan potensi pemanfaatan aset untuk mendukung program prioritas, antara lain penyediaan lokasi Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dukungan fasilitas untuk program koperasi merah putih.

Rencana Aksi Tahun 2026

Untuk menjaga capaian indikator Evaluasi Kinerja BMN pada Tahun 2026 tetap optimal, rencana aksi yang akan dilaksanakan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPKNL, korwil satker, dan satker untuk percepatan penyelesaian target serta penyelesaian permasalahan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian target masing-masing KPKNL secara periodik.

5. Sasaran Strategis: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Pelaksanaan pelayanan kekayaan negara dan lelang yang efektif mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam sasaran strategis ini, DJKN berkomitmen dalam mewujudkan:

1. kepemilikan resmi dan kejelasan status hukum atas tanah negara melalui sertipikasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan dalam mencapai tertib hukum dan administrasi;
2. pengurusan piutang negara melalui percepatan penyelesaian BKN, restrukturisasi, serta proses hukum lainnya dalam mencapai saldo berkas kasus piutang negara yang minimal;
3. efektivitas pelaksanaan layanan lelang dalam mendapatkan nilai yang optimal yang juga berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 3 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif				118,87%
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100%	116,60%	116,60
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	120,59%	120,00
5c-CP	Persentase produktifitas lelang	80%	122,01%	120,00

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (5a-CP) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Indikator kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022.

Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda. Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;

dan telah di *update* dan *upload* dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan *review* oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Indikator kinerja ini memiliki kaitan dengan indikator kinerja persentase penurunan outstanding piutang negara dan indikator kinerja persentase penerimaan negara dari unsur PNBPN berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. Tapi tidak semua penyelesaian BPKN menghasilkan PNBPN. Apabila suatu piutang ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Tidak dapat Ditagih setelah dilakukan upaya penagihan yang optimal, maka hanya akan mengurangi saldo BKPN dan outstanding piutang negara. Namun demikian, apabila dikemudian hari terdapat informasi mengenai keberadaan dan/atau kemampuan debitur dalam melunasi hutang, berkas tersebut dapat diaktifkan kembali.

Adapun trajectory indikator kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	(5a-CP) Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/Tik
Realisasi	146,57%	98,82%	98,82%	98,35%	98,35%	116,60%	116,60%	
Capaian	146,57%	98,82%	98,82%	98,35%	98,35%	116,60%	116,60%	
Nilai Kinerja	120%	98,82%	98,82%	98,35%	98,35%	116,60%	116,60%	

Rincian raw data capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus

Piutang Negara adalah sebagai berikut:

No.	Unit	Target Tahunan (Bobot)	Triwulan IV			Keterangan
			Target (Bobot)	Realisasi (Bobot)	Capaian (%)	
			Manual	Data by Sistem	Data by Sistem	
1	2	3	4	5	6	12
1	KANWIL DJKN Bali Nusra	332,00	332,00	387,10	116,60	SPPNL = 57, SPPNS = 1, PSBDT = 184, SPPPN = 1, PPNTD = 114
2	KPKNL Denpasar	300,00	300,00	323,80	107,93	SPPNL = 41, PSBDT = 145, SPPPN = 1, PPNTD = 114
3	KPKNL Singaraja	11,60	11,60	14,90	128,45	SPPNL = 6, PSBDT = 7
4	KPKNL Mataram	6,00	6,00	8,10	135,00	SPPNL = 4, PSBDT = 3
5	KPKNL Bima	3,40	3,40	4,60	135,29	SPPNL = 2, PSBDT = 2
6	KPKNL Kupang	19,00	19,00	35,70	187,89	SPPNL = 4, SPPNS=1, PSBDT = 27

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	116,60%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Pada tabel diatas, dapat dilihat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025 - 2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Indikator kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara dicascading kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100%	107,93%	107,93%	107,93%
2	Singaraja	100%	128,45%	128,45%	120%
3	Mataram	100%	135%	135%	120%
4	Bima	100%	135,29%	135,29%	120%
5	Kupang	100%	187,89%	187,89%	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja, telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan/asistensi kegiatan pengurusan piutang negara melalui pengurusan sederhana kepada KPKNL dalam kegiatan penagihan kepada debitur di lapangan serta koordinasi dengan penyerah piutang membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Percepatan penyelesaian berkas kasus piutang negara untuk melakukan angsuran/pelunasan.
2. Terhadap penanggung yang tidak ada kemampuan untuk membayar atau tidak diketahui keberadaannya segera diarahkan untuk dilakukan PSBDT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	37.944.000	30.407.000	Telah diselesaikan sebanyak 357 BKPN
2.	Bimbingan Teknis/ sosialisasi/ FGD Bidang Piutang Negara	37.824.000	36.364.825	Telah dilakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan FGD kepada petugas pengurus piutang di KPKNL, edukom ke <i>stakeholders</i> , serta pendampingan percepatan penerbitan PPNTO ke <i>stakeholders</i>

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada seksi Piutang Negara pada KPKNL.
2. Koordinasi dan sosialisasi dengan para penyerah piutang bersama-sama dengan KPKNL.
3. Melaksanakan kegiatan pendampingan percepatan penerbitan PPNTD terhadap berkas piutang negara yang telah dikelola secara optimal pada Pengelola Piutang Negara di Kementerian/Lembaga.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu banyaknya BKPN yang tidak dapat diselesaikan, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 13. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko untuk menurunkan tingkat kemungkinan keterjadiannya, diantaranya dengan:

1. Koordinasi, Monev Berkala, Bimbingan Teknis, Pembinaan Langsung, atau melalui media komunikasi lainnya, dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan, menyusun strategi serta tindak lanjut penyelesaian.
2. Meminta Prognosa kepada KPKNL dalam upaya memenuhi Target Realisasi Capaian Kinerja.
3. Melakukan pemantauan progres perkembangan.

Dengan demikian diproyeksikan risiko tersebut akan menjadi turun pada level 11.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Profil BKPN tanpa jaminan atau dengan jenis jaminan lain-lain dan ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikannya.
2. Penyerahan pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh penyerah piutang namun debitur dan tempat usahanya berlokasi diluar wilayah kerja KPKNL.
3. Penyerahan piutang negara yang tidak didukung dengan dokumen dan lampiran dokumen pendukung yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Pendekatan persuasif kepada debitur sehingga memperbesar potensi penyelesaian pengurusan.
2. Koordinasi dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang

sama dengan domisili penanggung utang.

3. Komunikasi kepada penyerah piutang dan melakukan penelitian penyerahan. Apabila tidak memenuhi unsur adanya dan unsur besarnya piutang negara maka dikomunikasikan secara informal dan formal untuk penolakan penyerahan piutang.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Indikator kinerja ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan isu GEDSI. Namun demikian, capaian indikator kinerja ini mendukung terwujudnya data piutang negara yang handal, serta apabila ada pembayaran piutang akan berkontribusi pada kenaikan PNBP pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk mendukung program pemerintah terkait isu GEDSI.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, capaian indikator kinerja ini mendukung terwujudnya data piutang negara yang handal, serta apabila ada pembayaran piutang akan berkontribusi pada kenaikan PNBP pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan pendekatan persuasif sehingga memperbesar potensi penyelesaian pengurusan.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi persuasive dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang sebelum dilakukan penyerahan kepada PUPN/KPKNL.

b. (5b-CP) Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip penilaian serta ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN, sedangkan Profesional

menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah/Tim Penilai Pemerintah yang ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Penilaian merupakan suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi, termasuk dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya terletak di wilayah kerja unit kerja lain berada.

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;

- d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan, sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL).
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.
- Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.
- Penilaian secara tepat waktu adalah:
- a. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN.
 - b. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN.
 - c. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN.
 - d. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
 - e. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 48 hari kerja untuk penilaian bisnis.
 - f. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 50 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Terhadap permohonan penilaian yang bersifat massal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN.
- b. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN.
- c. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN.
- d. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- e. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 38 hari kerja untuk penilaian bisnis.
- f. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 40 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam.

(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.

Jumlah hari tersebut berlaku:

- a. Untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. Untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. Untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.

Contoh perhitungan batas norma waktu yang harus dipenuhi untuk tiap permohonan penilaian adalah sebagai berikut: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 ($17 + 2 \times 3$) hari.

Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku, dengan jangka waktu penyelesaian diatas mengacu pada SOP Kanwil DJKN sesuai Kepdirjen KN nomor 58/KN/2023 tentang Perubahan Keenam atas Kepdirjen KN Nomor 163/KN/2014 tentang SOP Kantor Wilayah di Lingkungan DJKN.

Adapun formula realisasi IKU Tingkat kualitas layanan penilaian pada Kanwil DJKN dihitung dari 3 (tiga) komponen, antara lain:

1. Norma waktu layanan penilaian (bobot 40%), dihitung berdasarkan rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian sesuai tabel berikut:

Batas waktu penyelesaian	Indeks
1 hari s.d. 30% N	100
N - 60% N	95
N - 45% N	90
N - 30% N	85
N - 15% N	80
<N	75
N	70
N + 15% N	60
N + 30% N	50
N + 45% N	40
N + (>45% N)	30

N = Jumlah hari kerja maksimal penyelesaian Penilaian

Perhitungan capaian Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya

laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke Pemohon

Apabila penyelesaian penilaian menggunakan mekanisme bantuan tenaga penilai, maka capaian diakui oleh unit yang diminta untuk bantuan tenaga penilai.

2. Akurasi Data Layanan Penilaian (bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi Satu Kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) atau dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP / Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (bobot 30%)

Realisasi nilai hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian diperoleh berdasarkan persentase jumlah laporan penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85, dengan target tahun 2025 sebanyak 80% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang melalui Sistem Informasi Penilaian (SIP).

Contoh:

Pada Kanwil A terdapat 100 Laporan Penilaian yang diterbitkan pada bulan Desember s.d. Februari. Kaji Ulang dilakukan pada Maret. Hasil Kaji Ulang menunjukkan nilai rata-rata di atas 85 sebanyak 80 laporan. Maka realisasi komponen ini pada Q1 adalah $80/100 = 80\%$. Capaian komponen adalah $80\%/80\% = 100$.

Contoh 2:

Pada Kanwil B terdapat 100 Laporan Penilaian dikeluarkan pada bulan Desember s.d. Februari. Kaji Ulang dilakukan pada Maret. Hasil Kaji Ulang menunjukkan nilai rata-rata di atas 85 sebanyak 70 laporan. Maka realisasi komponen ini pada Q1 adalah $70/100 = 70\%$. Capaian komponen adalah $70\%/80\% = 87,5$.

Realisasi dihitung dengan konsolidasi periode *Take Last Known* sehingga untuk menghitung Realisasi Q2, hasil kaji ulang dari bulan Desember s.d. Mei diperhitungkan. Perhitungan nilai hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian, sesuai berikut.

Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85 / Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang

Adapun trajectory indikator kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	(5b-CP) Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/Avg
Realisasi	102,90%	122,39%	112,65%	132,17%	119,15%	124,90%	120,59%	
Capaian	147,00%	174,84%	160,92%	188,81%	170,21%	178,42%	172,27%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70%	-	70%	-	-	172,27%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Pada tabel diatas, dapat dilihat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025 - 2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak memiliki data historis.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian *dicascading* kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	70%	115,01%	164,30%	120%
2	Singaraja	70%	105,61%	150,87%	120%
3	Mataram	70%	112,53%	160,76%	120%
4	Bima	70%	122,03%	160,04%	120%
5	Kupang	70%	113,40%	162%	120%

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan kepada para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa

Tenggara melalui kegiatan sosialisasi dan *Forum Group Discussion* (FGD) baik terkait Manual IKU, pemenuhan realisasi, ketentuan Standar Operasi Prosedur (SOP), dan strategi pencapaiannya.

2. Meminta kepada para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara agar senantiasa melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan penilaian berikut SOP yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) dan realisasi IKU pada tautan monev capaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada <https://bit.ly/dashboardKIKanwilDJKNBalnus> .
4. Meminta agar para PFPP pada KPKNL untuk mengajukan perbantuan penilaian kepada Kantor Wilayah DJKN untuk selanjutnya nanti Kanwil DJKN yang akan mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut permohonan penilaian dengan mempertimbangkan ketersediaan Penilai di KPKNL lain dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam hal terdapat overload permohonan penilaian sedangkan ketersediaan SDM tidak mencukupi.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan monitoring capaian kinerja secara rutin, minimal tiap triwulan.
2. Melakukan koordinasi, monitoring, dan/atau pembinaan kepada para PFPP KPKNL untuk mengetahui permasalahan yang ada terkait pencapaian target kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Survei Lapangan dan Penilaian	28.716.000	26.541.200	Survei lapangan dalam rangka penilaian

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Perhitungan IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian dimulai dengan kegiatan penilaian yang diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pihak Pemohon. Tentunya akan beresiko bagi organisasi DJKN apabila penyelesaian layanan penilaian dilakukan tidak sesuai dengan

ketentuan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan mengingat dapat menyebabkan timbulnya risiko kinerja maupun risiko citra organisasi di mata masyarakat.

Hal ini tentunya menjadi perhatian pula bagi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara agar seluruh layanan penilaian dapat diselesaikan tepat waktu bahkan disampaikan kepada Pemohon sebelum tenggat waktu penyelesaian. Selain melakukan pembinaan secara berkala kepada seluruh PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Bidang Penilaian melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) dan realisasi IKU pada tautan monev capaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam hal ketersediaan SDM Penilai Pemerintah tidak mencukupi, Bidang Penilaian senantiasa berkoordinasi aktif untuk meminta agar para PFPP pada KPKNL untuk segera mengajukan perbantuan penilaian kepada Kantor Wilayah DJKN untuk selanjutnya nanti Kanwil DJKN yang akan mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut permohonan penilaian dengan mempertimbangkan ketersediaan Penilai di KPKNL lain dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Selain itu, dilakukan pula pemantauan secara berkala terhadap pengajuan Kaji Ulang laporan penilaian yang telah diajukan kepada Direktorat Penilaian melalui Sistem Informasi Penilaian (SIP), dengan berkoordinasi aktif dilakukan dengan para pengkaji ulang pada Kantor Pusat agar laporan penilaian yang diajukan dapat segera dilakukan kaji ulang guna meningkatkan kualitas laporan penilaian berikutnya.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam upaya untuk memenuhi pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, para PFPP dituntut untuk selalu meng-*update* kompetensi baik teknis maupun sosial kultural. Dalam hal terdapat kendala dan hambatan di lapangan yang dapat mempengaruhi penyelesaian layanan penilaian, para PFPP diminta harus berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan segera kepada Bidang Penilaian Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, yang tiada henti melaksanakan pembinaan kepada para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui kegiatan sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) baik terkait Manual IKU, pemenuhan realisasi, ketentuan Standar Operasi Prosedur (SOP), dan strategi pencapaiannya maupun non formal melalui diskusi di ruang kantor.

Pemantauan atau monitoring secara berkala juga terus dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) dan realisasi IKU pada tautan monev capaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada <https://bit.ly/dashboardKIKanwilDJKNBalnus> sehingga ketika terdapat layanan yang tersendat dapat segera diketahui dan dicarikan berbagai opsi penyelesaiannya, termasuk ketika ketersediaan SDM tidak mencukupi, para PFPP pada KPKNL harus segera

mengajukan perbantuan penilaian kepada Kantor Wilayah DJKN untuk selanjutnya nanti Kanwil DJKN yang akan mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut permohonan penilaian dengan mempertimbangkan ketersediaan Penilai pada Kanwil atau KPKNL lainnya di lingkungan DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Adanya media sosial Whatsapp Group, turut menyumbang kontribusi dalam hal koordinasi dengan para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian sehingga hal-hal yang menjadi kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan penilaian dapat terselesaikan dengan baik.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa hal yang seringkali menjadi kendala dan perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Beban kerja antar KPKNL tidak sama yang tidak diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai sehingga pelaksanaan penilaian harus dilakukan seefisien mungkin. Misalnya KPKNL Kupang yang memiliki wilayah kerja paling luas dengan 22 (dua puluh dua) kota/kabupaten yang harus diberikan pelayanan penilaian, tentunya memerlukan penanganan dengan baik
2. Permohonan penilaian seringkali *overload*, seperti dialami oleh KPKNL Denpasar yang mengakibatkan banyaknya permohonan penilaian yang terpaksa mengalami *grace period* dalam tindak lanjutnya.
3. Waktu penyelesaian laporan penilaian yang melebihi SOP.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah-langkah, antara lain:

1. Berkoordinasi aktif dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Bidang Penilaian sering menghadapi permasalahan terkait SDM, terutama ketika seluruh SDM Penilai tengah melaksanakan penilaian di lapangan. Apabila terdapat permohonan penilaian mendadak, sulit menentukan siapa yang akan menanganinya. Pentingnya koordinasi dengan KPKNL ataupun Kantor Pusat untuk mengatasi kendala ini.
2. Meminta KPKNL agar menyampaikan perbantuan penilaian kepada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Dibutuhkan sistem seperti *time chart* atau *time schedule* untuk memantau status permohonan dan pengaturan SDM. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat saling bahu membahu dengan seluruh KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempertimbangkan kedekatan wilayah dan factor efektivitas dan efisiensi guna memastikan tindak lanjut penilaian tetap berjalan lancar walaupun terdapat tantangan dalam

pengaturan SDM Penilai.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Meskipun layanan penilaian diberikan kepada satuan kerja, namun indikator kinerja ini mencerminkan adanya semangat untuk mewujudkan kesetaraan dalam memberikan layanan penilaian yang berkualitas, tanpa adanya diskriminasi, termasuk terkait isu GEDSI.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, kegiatan penilaian ada keterkaitannya dengan kegiatan pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kenaikan PNBP pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Setiap organisasi dengan kepemilikan aset berupaya mengelola aset tersebut secara optimal untuk memastikan kelangsungan operasionalnya. Aset dapat didefinisikan sebagai barang atau objek yang dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis, komersial, atau nilai pertukaran, yang dapat dimiliki atau digunakan oleh lembaga, organisasi, atau individu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, BMN adalah aset yang diperoleh melalui dana APBN atau sumber lain yang legal. Aset-aset ini meliputi tanah, gedung, jalan, kendaraan, dan alat kesehatan, yang harus dikelola secara efektif demi kepentingan publik.

Pengelolaan aset negara merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Kekayaan Negara (DJKN) yang berperan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, sebagai instansi vertikal, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bidang Penilaian sebenarnya telah menerapkan pengendalian internal melalui pendekatan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management* (COSO ERM) yang merupakan kerangka kerja manajemen risiko korporasi yang diterbitkan oleh COSO, dengan selalu menerapkan dan menandatangani Piagam Pakta Integritas dalam pelayanan penilaian kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan melakukan upaya pengendalian kualitas laporan penilaian yang dihasilkan oleh para Penilai Pemerintah.

Dengan pemantauan pengendalian waktu penyelesaian layanan penilaian melalui Sistem Informasi Penilaian (SIP) diharapkan dapat membantu organisasi dalam pengelolaan risiko secara efektif, terintegrasi, dan terstruktur. Selain itu Bidang Penilaian terus memperkuat

komunikasi dan kolaborasi antar unit melalui koordinasi intensif, pelatihan rutin dan diskusi (*Forum Group Discussion*) berkala yang fokus pada standar operasional, pencapaian target, dan pemahaman risiko. Dalam penetapan target kinerja Bidang Penilaian disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga IKU tersebut turut berfungsi sebagai tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi serta mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penilaian.

c. (5c-CP) Persentase Produktivitas Lelang

Tujuan dari indikator kinerja ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Indikator kinerja ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang dengan formula :

$$\left(\left(\frac{\sum (\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}})}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai berikut :

1. lelang noneksekusi sukarela : 75%
2. lelang noneksekusi wajib : 55%
3. lelang eksekusi HT, pailit, dan pengadilan : 5%,
4. lelang eksekusi selain HT, pailit, dan pengadilan : 25%

Adapun *trajectory* indikator kinerja Persentase Produktivitas Lelang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	(5c-CP) Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	100,67%	91,72%	91,72%	126,70%	126,70%	122,01%	122,01%	
Capaian	335,56%	229,3%	229,3%	181%	181%	152,51%	152,51%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka

menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	-	80%	-	-	152,51%
2024	89%	-	34%	-	-	115,30%
2023	80%	-	34%	36%	-	94,86%
2022	36%	-	34%	-	-	43,84%
2021	35%	-	34%	-	-	48,94%

Pada tabel diatas, dapat dilihat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025 - 2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Capaian realisasi pada Tahun 2023, tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengingat pada tahun 2023 terdapat perubahan manual IKU dengan memasukkan unsur frekuensi lelang dalam formula Produktivitas. Perubahan formula disebabkan adanya pembahasan pada saat refinement IKU yang diselenggarakan mulai akhir tahun 2022.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Persentase Produktivitas Lelang *dicascading* kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	80%	103,46%	129,32%	120%
2	Singaraja	80%	115,14%	143,93%	120%
3	Mataram	80%	135,40%	169,25%	120%
4	Bima	80%	102,65%	128,32%	120%
5	Kupang	80%	120%	150%	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Produktivitas Lelang, telah dilakukan *extra effort*, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi intensif dengan KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II melalui berbagai media komunikasi (telepon, *WhatsApp Group*, *Teams Meeting*, *Zoom Meeting*, dan lainnya) guna memastikan tercapainya target produktivitas lelang.
2. Melaksanakan koordinasi dengan para pemohon lelang, khususnya perbankan untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial laku dan nilainya signifikan, serta menetapkan nilai limit lelang secara bertahap hingga nilai likuidasi.
3. Melaksanakan penggalian potensi lelang pada *stakeholder* dengan objek lelang yang

potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk UMKM).

4. Melaksanakan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan strategi pemasaran objek lelang.
5. Meningkatkan publikasi lelang melalui *e-Auction*, media sosial, dan laman resmi Kanwil/KPKNL.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Realisasi indikator kinerja produktivitas lelang berhasil dicapai dengan baik dikarenakan:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelayanan lelang dalam rangka mendukung perbaikan berkelanjutan (*continues improvement*).
2. Sosialisasi implementasi aplikasi lelang.go.id V2.
3. Koordinasi intensif dengan para *stakeholder* lelang.
4. Penggalan potensi lelang, termasuk lelang sukarela produk UMKM.
5. Perbaikan operasional yang membuat proses lelang lebih cepat dan efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Sosialisasi / edukasi dibidang lelang	6.642.000	4.200.000	1. Pembinaan secara daring 2. Pembinaan terkait lelang UMKM 3. Lelang amal serta edukom
2.	Rekomendasi hasil monev serta tindak lanjut atas pelaksanaan lelang	61.505.000	57.741.203	1. Pemantauan lelang pada KPKNL dan pemantauan terhadap kegiatan Balai Lelang 2. Pemenuhan permindok BPK dengan melakukan koordinasi dengan 5 KPKNL, 4 Balai Lelang, dan 14 PL II
3.	Peningkatan kompetensi pejabat Lelang	27.240.000	27.240.000	Pemeriksaan Minuta Risalah Lelang terhadap 5 KPKNL dan 14 PL II serta pemeriksaan berkala 4 Balai Lelang
4.	Penggalan potensi lelang	29.888.000	29.888.000	Penggalan potensi lelang ke Perbankan dan Pelaku UMKM
5.	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	9.104.000	9.104.000	Memproses perizinan 5 PL II (1 pindah wilayah jabatan, 4 perpanjangan)

Ket: Kegiatan/anggaran ini dapat berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi produktivitas lelang di

antaranya meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi capaian secara berkala terhadap capaian Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II.
2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara triwulanan.
3. Sosialisasi aplikasi/peraturan/kebijakan lelang terbaru kepada *stakeholder*, baik melalui tatap muka maupun daring.
4. Pembinaan lelang yang dilakukan secara intensif.
5. Penguatan kemitraan strategis dengan para *stakeholder* lelang.
6. Pelaksanaan kegiatan lelang serentak oleh Pejabat Lelang Kelas II.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP lelang, terdapat risiko berupa potensi laku lelang cenderung rendah. Risiko ini, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 13, telah dilakukan mitigasi melalui pemantauan dan penggalian potensi lelang kepada pihak perbankan, serta koordinasi dan pembinaan kepada *stakeholder* dan KPKNL untuk optimalisasi potensi lelang. Dengan langkah tersebut, risiko diproyeksikan menurun menjadi turun pada level 11.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Sebagai Upaya untuk memastikan partisipasi yang setara, materi publikasi lelang disusun dengan bahasa yang sederhana dan ramah pembaca, serta didukung oleh aksesibilitas digital. Selain itu, disediakan kanal pengaduan yang responsif untuk menampung masukan dan menyelesaikan kendala secara cepat. Prinsip non-diskriminasi diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses lelang. Hal ini menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa adanya perlakuan berbeda. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi, lelang juga diarahkan untuk membuka peluang pemanfaatan aset produktif bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan. Upaya ini diperkuat melalui sosialisasi yang terarah dan sesuai kebutuhan, sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan lelang secara optimal. Pendekatan inklusif ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong pemerataan akses terhadap aset produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Produktivitas lelang dijalankan sejalan dengan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, mendukung pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses terhadap aset produktif, serta memperkuat penerimaan negara dan menjamin kepastian hukum melalui

pelaksanaan lelang yang transparan dan akuntabel. Peningkatan produktifitas lelang akan berkontribusi terhadap kenaikan PNBPN pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna terus meningkatkan capaian realisasi produktivitas lelang, rencana aksi yang akan dilakukan meliputi:

1. Koordinasi intensif dengan KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II.
2. Koordinasi dengan para pemohon lelang, khususnya perbankan guna melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial laku dan nilainya cukup besar, serta menetapkan nilai limit lelang secara bertahap hingga nilai likuidasi.
3. Penggalan potensi lelang pada stakeholder, termasuk lelang sukarela produk UMKM.
4. Koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan strategi pemasaran objek lelang.
5. Peningkatan publikasi lelang melalui e-Auction, media sosial, dan laman resmi Kanwil/KPKNL.
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelayanan lelang dalam rangka mendukung perbaikan berkelanjutan (continues improvement).
7. Sosialisasi aplikasi/peraturan/kebijakan lelang yang terbaru kepada stakeholder.

6. Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif

Organisasi, SDM, dan teknologi informasi merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompotensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Teknologi informasi yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam mendorong Kemenkeu agar relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Keandalan Sistem Informasi dalam dunia yang serba digital menjadi salah satu hal yang penting (salah satunya dalam mewujudkan dan menjaga reputasi Kementerian Keuangan secara khusus dan Pemerintah secara umum di mata masyarakat/stakeholder). Pengelolaan layanan TIK yang andal tercermin dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 3 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif				120%
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120%
6b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%	100%	120%
6c-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100	125,22	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (6a-CP) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal

249 ayat (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Formula perhitungan indikator kinerja Indeks Kualitas Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Triwulan I, II, dan III

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)

2. Perhitungan Triwulan IV

Perhitungan Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

Adapun *trajectory* indikator kinerja Indeks Kualitas Kinerja Anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif (6a-CP) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Indikator kinerja Indeks Kualitas Kinerja Anggaran merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Indeks Kualitas Kinerja Anggaran *dicascading* kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian
1	Denpasar	100	120	120%
2	Singaraja	100	120	120%
3	Mataram	100	120	120%
4	Bima	100	120	120%
5	Kupang	100	120	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah

dilakukan *extra effort* berupa melakukan pendampingan dan monitoring kepada setiap bidang / bagian umum dalam melakukan realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana dan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi target penyerapan anggaran dan mengurangi deviasi antara rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembentukan Tim Pengelola Keuangan yang telah dilakukan di awal tahun.
2. Penyusunan rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan.
3. Adanya peranan pimpinan dalam melakukan monitoring pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Kinerja Anggaran pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak menggunakan sumber dana tertentu dalam anggaran unit kerja dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan tuisi sehingga secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. Namun demikian, secara umum dari total pagu tahun anggaran sebesar Rp3.824.379.000,00, realisasi anggaran Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah Rp3.021.775.178,00 (98,02% dari total pagu neto sebesar Rp3,082,880,000).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang kualitas pelaksanaan anggaran di antaranya adalah:

1. Koordinasi dan komunikasi dengan seluruh *person in charge*/PIC masing-masing bagian/bidang untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
2. Penyusunan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan secara berkala.
3. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran terhadap rencana pelaksanaan anggaran secara bulanan.
4. Menindaklanjuti ketentuan dalam Langkah-langkah akhir tahun untuk percepatan pelaksanaan anggaran di akhir periode anggaran.
5. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu adanya perubahan kebijakan dan struktur anggaran (penambahan/pengurangan), yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 8. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan koordinasi dengan seluruh bidang terkait dengan RPD dan penyerapan anggaran. Dengan demikian diproyeksikan ketiga risiko tersebut akan menjadi turun pada level 6.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Terdapat efisiensi anggaran belanja sebagaimana Instruksi Presiden RI nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sementara target output tidak berubah.
2. Adanya Relaksasi kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-497/MK.03/2025 tanggal 19 Juli 2025 hal Persetujuan Relaksasi Kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 pada Kementerian Keuangan di tengah periode triwulan III 2025.
3. Besarnya deviasi antara rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Pembatasan perjalanan dinas dalam negeri secara sangat selektif serta penetapan satuan biaya uang harian perjalanan dinas di bawah SBM.
2. Percepatan penyerapan anggaran pasca kebijakan relaksasi efisiensi anggaran.
3. Adanya monitoring terkait dengan penyerapan anggaran dan melakukan lebih cermat latas penyusunan rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator kinerja ini tidak secara langsung terkait dengan isu GEDSI. Namun demikian, dalam pelaksanaan anggaran, baik untuk pemberian layanan kepada pengguna jasa, pelaksanaan tugas terkait dengan pihak eksternal, maupun untuk penyelenggaraan dukungan manajemen, dilaksanakan secara profesional dengan tidak melakukan pembedaan terkait isu GEDSI.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini dilaksanakan dengan berpedoman pada instruksi presiden RI nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Rencana aksi ke depan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Menyampaikan ketentuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di awal periode anggaran.
2. Menyampaikan terkait realisasi anggaran kepada setiap bidang/bagian umum sehingga dapat dilakukan perencanaan anggaran dan kegiatan secara akurat.
3. Monitoring dan evaluasi terkait capaian output tiap anggaran bagian/bidang.
4. Mendorong peningkatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk mengurangi uang tunai pada bendahara.

b. (6b-N) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Indikator kinerja ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu:

1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai
 - a. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - b. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - c. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.
 - d. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.
2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan
 - a. AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di

lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

- b. Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:
- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
 - Pembeding penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
 - Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
 - Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
 - Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
 - Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
 - Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
 - Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

Formula perhitungan indikator kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai adalah sebagai berikut:

Capaian IKU = (Komponen I x 80%) + (Komponen II x 20%)
- Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai = Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP / Jumlah Pegawai Aktif
- Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan = Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan / Jumlah Pegawai terpanggil

Dikecualikan dari formula IKU komponen I adalah:

1. pegawai yang akan pensiun di tahun 2025;
2. pegawai yang sedang/dalam status tugas belajar dibiayai, cuti di luar tanggungan negara,

- dipekerjakan, atau diperbantukan;
3. pegawai yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2025;
 4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2025 tidak diperhitungkan di unit barunya;
 5. Pegawai pada unit non-eselon.

Dikecualikan dari formula IKU komponen II adalah pelatihan yang sifatnya *mandatory*.

Adapun *trajectory* indikator kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif (6b-N) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	36%	69,52%	69,52%	82,86%	82,86%	100%	100%	
Capaian	180%	173,8%	173,8%	138%	138%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	-	-	-	-	100%
2024	100%	-	-	-	-	120%
2023	100%	-	-	-	-	120%
2022	100%	-	-	-	-	120%
2021	100%	-	-	-	-	120%

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Terdapat perubahan manual IKU/tata cara perhitungan pada indikator kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2025, sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung antara target dan realisasi tahun 2025 dengan target dan realisasi tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tidak dicascading kepada

KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Namun demikian, pada KPKNL terdapat indikator kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	80%	100%	125%	120%
2	Singaraja	80%	96%	120%	120%
3	Mataram	80%	100%	125%	120%
4	Bima	80%	100%	125%	120%
5	Kupang	80%	100%	125%	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* berupa penyampaian informasi pelatihan *mandatory* (wajib) untuk para pegawai, serta pembuatan formulir pendataan pelatihan yang telah diikuti pegawai agar dapat diperoleh data yang komprehensif terkait pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh pegawai.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Keinginan sebagian besar individu pegawai untuk mengembangngkan diri melalui pelatihan yang dibutuhkan dan memenuhi jam pelatihan yang ditentukan.
2. Monitoring dan evaluasi oleh unit Subbagian Sumber Daya Manusia.
3. Terdapat beberapa pelatihan yang wajib diikuti untuk para pegawai dari eselon I.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan melalui pelatihan jarak jauh, *e-learning*, dan pelatihan tatap muka, yang menggunakan anggaran dari unit penyelenggara dan/atau Sekretariat DJKN, serta tidak menggunakan sumber dana tertentu dalam anggaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dengan demikian, secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan persentase pengembangan kompetensi pegawai diantaranya adalah kewajiban penyusunan *Individual Development Plan* yang disusun di awal tahun, yang memuat target kompetensi yang hendak dicapai serta rencana pengembangan kompetensinya. Dengan demikian, setiap pegawai telah memiliki rencana pengembangan kompetensi yang harus dipenuhi setiap tahunnya.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan/banyak terjadi pengunduran diri diklat yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 8. Terkait hal tersebut telah dilakukan mitigasi risiko untuk menurunkan tingkat kemungkinan keterjadiannya dengan melakukan reminding dan monitoring kepada pegawai yang mendapatkan pemanggilan pelatihan. Dengan demikian diproyeksikan risiko tersebut akan menjadi turun pada level 4.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Minimnya pelatihan wajib bagi para pegawai di awal hingga pertengahan tahun.
2. Tidak adanya media bagi unit pengelola pegawai untuk mengetahui pelatihan yang diikuti pegawai secara otomatis tanpa adanya komunikasi dengan pegawai yang bersangkutan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Pembuatan formulir pendataan pelatihan yang telah diikuti pegawai.
2. Melakukan monitoring capaian pegawai yang telah mengembangkan kompetensinya.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mendorong pegawainya untuk menggunakan website KLC Kemenkeu sebagai sarana pengembangan kompetensi. Penggunaan website KLC Kemenkeu ini merupakan salah satu langkah untuk mendorong adanya kesetaraan bagi seluruh pegawai untuk mengakses pelatihan, tanpa adanya diskriminasi terkait dengan isu GEDSI.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, dengan adanya kenaikan kompetensi pegawai, diharapkan terwujud kualitas pelaksanaan APBN, khususnya terkait kenaikan capaian PNBPN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Menyediakan halaman monitoring yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
2. Menyampaikan informasi pelatihan *mandatory* (wajib) untuk para pegawai (jika ada).
3. Tetap menyediakan formulir pendataan pelatihan yang telah diikuti pegawai.

c. (6c-N) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Pengukuran indeks diukur sebagai berikut:

1. Target Tahunan

Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100) target 80

2. Pembobotan:

SIRUP : 60%

E-Tendering : 10%

E-Purchasing Katalog : 10%

Non E-Tendering dan Non E-Purchasing :10%

E-Kontrak : 10%

3. Realisasi:

capaian > 85% = realisasi indeks 120

capaian 80%-85% = realisasi indeks 100

capaian 50% - 79% = realisasi sama dengan capaian dikalikan 100

capaian < 50% = realisasi indeks 0

4. *Trajectory*:

Target Q1 = 40 (Self Assessment)

Target Q2 = 60 (Self Assessment)

Target Q3 = 70 (Self Assessment)

Target Q4 = 80 (Perhitungan ITKP dari LKPP)

Keterangan: *Self assessment* dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP).

Adapun *trajectory* indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif (6c-N) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Min/TLK

Realisasi	120	145,71	145,71	135	135	125,22	125,22
Capaian	120%	145,71%	145,71%	135%	135%	125,22%	125,22%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	125,22
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tidak *dicascading* kepada KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Namun demikian, pada KPKNL terdapat indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100	110	110%	110%
2	Singaraja	100	120	120%	120%
3	Mataram	100	120	120%	120%
4	Bima	100	120	120%	120%
5	Kupang	100	125,22	125,22%	120%

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* berupa *update* dan monitoring berkala nilai indeks setiap bulan.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penguatan Komitmen Pimpinan. Komitmen pimpinan Kanwil DJKN Balinusra berperan signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola PBJ. Komitmen pimpinan menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan dalam pengadaan. Hal tersebut dapat tercermin dari:
 - a. Dukungan penuh terhadap kebijakan pengadaan yang transparan dan akuntabel;
 - b. Arahan strategis kepada seluruh satuan kerja agar mematuhi regulasi PBJ;
 - c. Monitoring berkala terhadap capaian indikator Indeks Tata Kelola PBJ.
2. Peningkatan Kompetensi SDM Pengadaan. SDM yang kompeten mampu melaksanakan proses pengadaan secara lebih efektif, efisien, dan minim kesalahan administratif. Wujud peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya:
 - a. Meningkatnya jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. Keikutsertaan pegawai dalam bimbingan teknis, sosialisasi, dan klinik PBJ;
 - c. Pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi terbaru, termasuk Perpres PBJ dan aturan turunannya.
3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan e-Purchasing melalui katalog elektronik. Pemanfaatan sistem elektronik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi.
4. Koordinasi dan sinergi antarbidang/bagian. Sinergi antara unit pengelola pengadaan, pejabat perbendaharaan dan unit/bidang teknis turut mendorong peningkatan kinerja.
5. Serta penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan karena pengendalian yang kuat mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan keandalan proses pengadaan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya terkait indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Layanan Perkantoran (EBA.994)	1.157.290.000	1.153.776.526	Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain belanja keperluan perkantoran, penambah daya tahan tubuh, belanja honor operasional satuan kerja hingga belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.
2.	Peralatan Fasilitas Perkantoran (EBB.001)	176.655.000	169.652.300	Kegiatan ini merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang terdiri dari kamera digital, AC Split dan standing, sice, TV, kursi rapat dan distance meter.
3.	Kendaraan Bermotor (EBB.003)	426.800.000	426.748.400	Kegiatan ini merupakan belanja modal kendaraan bermotor yang terdiri dari masing-masing satu unit mobil dan sepeda motor listrik.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terlambat/tidak sesuai jadwal/ketentuan/kontrak yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 11. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko untuk menurunkan kemungkinan keterjadiannya, di antaranya dengan menyelenggarakan rapat/pembahasan dengan seluruh Bagian/Bidang terkait usulan pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi turun pada level 10.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, ada kendala yaitu terdapat kebijakan relaksasi belanja modal pada triwulan IV tahun 2025 yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Untuk mengatasi kendala dimaksud, telah dilakukan koordinasi dengan pemilik kegiatan (Bagian/Bidang) dan Kantor Pusat DJKN c.q. Bagian PBMNRTTU.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki keterkaitan dengan isu GEDSI. Adanya kesetaraan dalam pengadaan barang dan jasa diantaranya tercermin dalam prinsip tercermin dari prinsip transparan, terbuka, bersaing, dan adil. Prinsip ini memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat diikuti oleh pihak – pihak yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, adanya proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan berimbang pada penerimaan APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Dalam rangka menjaga capaian kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tetap optimal pada tahun 2026, perlu dilakukan koordinasi dengan pemilik kegiatan (bidang/bagian).

7. Sasaran Strategis: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK No. 129/PMK,01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi *stakeholder* dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi *stakeholder* sesuai dengan service level agreement yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk stakeholder

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif				117,51
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	6,60	120
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	115,01	115,01%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (7a-CP) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Indikator kinerja Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan pada tingkat kantor wilayah terdiri dari unsur:

1. Agenda Setting

- a. Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat dan kantor vertikal (Kanwil dan KPKNL) sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu.
- b. Data atau informasi disampaikan melalui aplikasi EKSIS atau ditentukan lain.
- c. Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1 dan Kanwil yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1 dan Kanwil lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A.

d. Item penilaian terdiri dari:

- Implementasi taktik (50%)

Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.

- Jumlah postingan medsos (50%)

Tidak ada postingan, nilai 0

1 < baseline, nilai 90

>= baseline, nilai 100

Baseline jumlah postingan medsos Kanwil:

No.	UE 1 (Jumlah Kanver-Kanwil)	Baseline Jumlah Postingan
1	DJKN (17 Kanwil)	68(+ 4 post/Kanwil)

Dengan rincian tiap kantor wilayah sebagai berikut:

No	Unit	Baseline Jumlah Postingan
1	Kanwil DJKN Aceh	4 post
2	Kanwil DJKN Sumatera Utara	4 post
3	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	4 post
4	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	4 post
5	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	4 post
6	Kanwil DJKN Banten	4 post
7	Kanwil DJKN DKI Jakarta	4 post
8	Kanwil DJKN Jawa Barat	4 post
9	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	4 post
10	Kanwil DJKN Jawa Timur	4 post
11	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	4 post
12	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	4 post
13	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	4 post
14	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	4 post
15	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	4 post
16	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	4 post
17	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	4 post

2. Indeks Efektifitas *Employee advocacy*

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *Employee advocacy* dimaksud. *Cascading* dapat dilakukan hingga ke IKU Pelaksana untuk optimalisasi.

Implementasi program *employee advocacy* dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit. Adapun penentuan nama pemangku tugas *Employee advocacy*, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver).

Item penilaian terdiri dari:

a. *Activities* (100%)

- Topik amplifikasi: sesuai topik proaktif Agenda Setting yang ditetapkan
- Baseline target pegawai: 25% dari total pegawai setiap Unit Eselon I
- Pengukuran diambil dari 1 edisi per bulan dengan capaian final tertinggi:
 - Realisasi jumlah pegawai 25% atau lebih, nilai 100.
 - Realisasi jumlah pegawai 20% sampai dengan kurang dari 25%, nilai 95.
 - Realisasi jumlah pegawai 15% sampai dengan kurang dari 20%, nilai 93.
 - Realisasi jumlah pegawai 10% sampai dengan kurang dari 15%, nilai 90.
 - Realisasi jumlah pegawai < 10%, nilai 80.

b. *Outcome* (20%)

- Definisi: *stakeholder* sudah aware dengan isu-isu Kemenkeu yang diperoleh dari konten EA yang disebarakan pegawai
- Diukur dengan survei kepada pegawai Kemenkeu dan masyarakat.
- Target responden 50% internal dan 50% publik.
- Target capaian:
 - Pegawai: 10% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu
 - Publik: 3% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu
- Penilaian outcome

Survei Pegawai		Survei Publik	
Capaian >= 10%	Nilai 100	Capaian >= 3%	Nilai 100
Capaian 8% s.d. <10%	Nilai 90	Capaian 2,5% s.d. <3%	Nilai 90
Capaian 5% s.d. <8%	Nilai 80	Capaian 2% s.d. <2,5%	Nilai 80
Capaian 3% s.d. <5%	Nilai 70	Capaian 1,5% s.d. <2%	Nilai 70
Capaian >0% s.d. <3%	Nilai 50	Capaian 1% s.d. <1,5%	Nilai 50
Capaian 0%	Nilai 0	Capaian >0% s.d. <1%	Nilai 40
		Capaian 0%	Nilai 0

Outcome = 50% capaian survei pegawai + 50% capaian survei publik

Selanjutnya untuk menghitung capaian Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan dilakukan dengan formula sebagai berikut:

Formula:

$$(Agenda Setting \times 50\%) + (Indeks Efektivitas Employee Advocacy \times 50\%)$$

- konversi skala 1-4 (agar ditulis hingga 4 angka di belakang koma).
- Indeks 3,75 merupakan batas maksimal 120%.
- Berlaku indeks normal apabila capaian $\leq 3,55$, maka realisasi dituliskan sesuai capaian.
- Berlaku indeks konversi apabila capaian $> 3,55$, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formula Indeks Konversi} = (100\% + (((\text{Capaian} - 3,55) / 0,2 * 100\%) * 20\%)) * 3,55$$

Contoh:

- Capaian unit = 3.7300
- Maka pada realisasi IKU Unit, dituliskan konversinya menjadi = 4.1890 (atau setara 118%)

Adapun *trajectory* indikator kinerja Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif (7a-CP) Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan							PoI/KP	
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4		Y-25
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	Max/Avg
Realisasi	6,73	6,57	6,65	6,57	6,62	6,45	6,60		
Capaian	189,57%	185%	187,32	185%	186,4%	181,69%	185,91%		
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka

menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	3,55	-	-	-	-	6,60
2024	3,55	3,55	3,55	3,55	-	5,23
2023	-	3,55	3,55	3,55	-	-
2022	-	3,55	3,55	3,5	-	-
2021	-	3,55	3,55	-	-	-

Ket: renstra dan renja Kemenkeu, serta renstra DJKN tahun 2021 - 2024 diambil dari LAKIN DJKN 2024

Untuk tahun 2025, tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tidak di-*cascading* ke KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, serta tidak ada indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada perjanjian kinerja KPKNL. Namun demikian, dalam pencapaian IKU ini melibatkan KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai pelaksana agenda setting dan *employee advocacy*.

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan dan monitoring partisipasi KPKNL pada Agenda Setting yang telah ditetapkan dan partisipasi pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk pelaksanaan *Employee Advocacy*. Selain itu, juga dilaksanakan pembinaan secara langsung oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penunjukan Anggota Tim *Employee Advocacy* yang telah dilakukan di awal tahun.
2. Pelaksanaan monitoring dan pendampingan baik dalam pelaksanaan Agenda Setting maupun *Employee Advocacy*.

3. Pembinaan secara langsung oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Kehumasan	17.422.000	13.121.900	Telah dilaksanakan: 1. Pembinaan/Sosialisasi/Diskusi kehumasan dan publikasi pada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, dengan rincian 4 kegiatan dilaksanakan secara <i>offline</i> dan 1 kegiatan dilaksanakan secara <i>online</i> . 2. Peliputan kegiatan pimpinan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai bahan publikasi. 3. Penyusunan video, foto, maupun flyer sebagai bahan tayang publikasi di media sosial dan website.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja indeks efektivitas ekosistem kehumasan diantaranya adalah penyelenggaraan Kegiatan Asset Talk bekerja sama dengan KPKNL Kupang, KPKNL Bima, dan KPKNL Mataram, serta publikasi konten lainnya pada media sosial, *website* maupun kanal Youtube Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk menaikkan *engagement*.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu kurang tepatnya penyampaian informasi untuk membangun citra positif organisasi. Terkait hal tersebut telah dilaksanakan publikasi informasi tentang profil Kanwil, publikasi informasi tentang kegiatan Kanwil sebagai Badan Layanan Publik, serta publikasi layanan pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, baik secara offline maupun online. Publikasi tersebut diharapkan berdampak positif terhadap efektifitas ekosistem kehumasan.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang mengelola kehumasan unit kerja secara khusus

dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan.

2. Kurangnya kemampuan maupun keterampilan pegawai dalam produksi kehumasan yang berkualitas.
3. Keterbatasan sarana untuk mendukung produksi kehumasan yang berkualitas.
4. Belum semua pemangku tugas Employee Advocacy secara aktif melakukan amplifikasi kehumasan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Menghimbau pegawai terkait untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait kehumasan.
2. Mengajukan permohonan pengadaan sarana pendukung produksi kehumasan.
3. Membentuk tim pengelola akun media sosial dan tim *employee advocacy*.
4. Melaksanakan pembinaan dan monitoring berkala untuk meningkatkan partisipasi *employee advocacy*.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator kinerja ini mencerminkan adanya kesetaraan sosial yaitu seluruh pengguna jasa dapat mengakses informasi terkait dengan layanan maupun kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui media sosial, website, atau sarana informasi lainnya tanpa mendapatkan diskriminasi terkait dengan faktor GEDSI.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, media sosial Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara aktif mempublikasikan capaian APBN KITA, baik melalui repost akun Instagram Kementerian Keuangan, maupun publikasi APBN KITA regional Bali melalui website Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, dimana penggunaan APBN salah satunya untuk mendukung Program Prioritas Presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam bidang kehumasan.
2. Mengoptimalkan peran pegawai lintas seksi maupun bidang untuk mendukung produksi kehumasan yang berkualitas dengan menetapkan Tim Pengelola Akun Media Sosial.
3. Kolaborasi dengan kehumasan lintas Eselon I pada Kementerian Keuangan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara.

b. (7b-N) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (Komponen A)

Indeks ini mengukur ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen pengukuran yaitu:

1. Perkara tahun berjalan saat belum terdapat putusan.
2. Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025.
3. Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

Nilai indeks dihitung dari tahapan perkara terakhir pada saat pengukuran. Nilai indeks untuk tiap posisi perkara ditentukan sebagai berikut:

No.	Posisi Tahapan Perkara	Nilai Indeks
1	Menerima Gugatan dan Menyampaikan ND Permohonan SKU	80
2	Menerima SKU dan menyampaikan kepada Pengadilan	90
3	Mediasi	95
4	Penyampaian Jawaban	95
5	Replik/Duplik	95
6	Pemeriksaan Alat Bukti	95
7	Pemeriksaan Saksi/Ahli	95
8	Pemeriksaan Setempat	95
9	Kesimpulan	95
10	Mengajukan Perlawanan/Gugatan	100
11	Mengajukan Banding/Keberatan atau Menyusun dan Mengajukan Kontra memori Banding/Keberatan	100
12	Menyusun dan Mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi	100
13	Menyusun dan Mengajukan memori Peninjauan Kembali atau Kontra memori Peninjauan Kembali	100

Lingkup peradilan meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Khusus, Komisi Informasi, dan Arbitrase dengan target nilai indeks sebesar 85.

Untuk menghitung realisasi, perlu dihitung terlebih dahulu nilai indeks komponen A dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Komponen A} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Indeks Setiap Perkara Komponen A}}{\sum \text{Perkara Komponen A}} \right)$$

Setelah didapatkan nilai indeks komponen A, untuk menghitung realisasi komponen A digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Komponen A} = \left(\frac{\text{Nilai Indeks Komponen A}}{\text{Target Nilai Komponen A}} \right) * 100$$

b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (Komponen B)

Indeks ini dihitung dari perkara yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, meliputi:

1. Perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.
3. Putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen pengukuran yaitu:

1. Perkara tahun berjalan saat sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya.

Nilai indeks dihitung dari jenis putusan/penetapan yang berkekuatan hukum tetap, dengan target komponen B sebesar 90. Adapun nilai indeks untuk setiap jenis putusan/penetapan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Putusan/Penetapan	Nilai Indeks
1	Putusan Inkracht Menang	120
2	Penetapan Damai	110
3	Penetapan Cabut	100
4	Penetapan Gugur	90
5	Putusan Kalah Inkracht Non Executable	80
6	Putusan Kalah Inkracht diperintahkan melaksanakan sesuatu (Non TGR)	70
7	Putusan Inkracht Kalah dihukum membayar tuntutan ganti rugi	60

Untuk menghitung realisasi, perlu dihitung terlebih dahulu nilai indeks komponen B dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Komponen B} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Indeks Setiap Perkara Komponen B}}{\sum \text{Perkara Komponen B}} \right)$$

Setelah didapatkan nilai indeks komponen B, untuk menghitung realisasi komponen B digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Komponen B} = \left(\frac{\text{Nilai Indeks Komponen B}}{\text{Target Nilai Komponen B}} \right) * 100$$

Selanjutnya untuk menghitung realisasi, dilakukan dengan cara memperhatikan kondisi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Formula Perhitungan
1	Terdapat nilai untuk kedua komponen	(Realisasi Komponen A * 80%) + (Realisasi Komponen B * 20%)
2	Hanya terdapat nilai untuk komponen A	(Realisasi Komponen A * 100%)
3	Hanya terdapat nilai untuk komponen B	(Realisasi Komponen B * 100%)

Adapun trajectory indikator kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif (7b-N) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	113,92	115,26	115,26	114,32	114,32	115,01	115,01	115,01	
Capaian	113,92%	115,26%	115,26%	114,32%	114,32%	115,01%	115,01%	115,01%	
Nilai Kinerja	113,92%	115,26%	115,26%	114,32%	114,32%	115,01%	115,01%	115,01%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	115,01
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Indikator kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum dicascading kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Adapun rincian target dan

realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	100	115,13	115,13%	115,13%
2	Singaraja	100	116,26	116,26%	116,26%
3	Mataram	100	113,08	113,08%	113,08%
4	Bima	100	116.83	116.83%	116.83%
5	Kupang	100	115.87	115.87%	115.87%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* berupa *update* dan monitoring berkala nilai indeks setiap bulan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Memproses dan menyampaikan surat kuasa khusus dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses persidangan.
2. Melakukan pembinaan/sosialisasi/diskusi penanganan perkara.
3. Melakukan monitoring efektifitas kegiatan pembinaan dan menghimpun masukan dari KPKNL untuk perbaikan kegiatan/materi pembinaan selanjutnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Legislasi dan litigasi	19.768.000	18.803.600	Telah dilaksanakan: 1. Penerbitan SKU untuk Penanganan Perkara di Pengadilan sebanyak 67 perkara. 2. Pengajuan/Penerusan Permohonan SKU untuk Beracara di Pengadilan kepada Biro Advokasi/Dit HH DJKN sebanyak 10 perkara. 3. Pemberian Bantuan Penanganan Perkara di Pengadilan sebanyak 3 perkara. 4. Pembinaan / Sosialisasi / Diskusi Penanganan Perkara dengan penanganan perkara pada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, dengan rincian 3 kegiatan dilaksanakan secara <i>online</i> dan 2 kegiatan dilaksanakan secara <i>offline</i> .

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum tahun 2025 diantaranya adalah adanya bantuan penanganan perkara dari Biro Advokasi untuk perkara yang mengandung TGR yang ada di KPKNL.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu terjadinya putusan pengadilan kalah yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 11. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko untuk menurunkan kemungkinan keterjadiannya, di antaranya dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan / sosialisasi / diskusi penanganan perkara dengan penanganan perkara pada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi turun pada level 10.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya potensi keterlambatan dipenuhinya kelengkapan dokumen Surat Kuasa Khusus (SKU) yang digunakan untuk keperluan beracara di pengadilan. Terkait hal tersebut, di level kanwil telah diatasi dengan melakukan monitoring terhadap permohonan SKU sehingga setiap permohonan SKU dapat terpantau prosesnya dan tidak ada yang terlambat.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Indikator kinerja ini mencerminkan adanya kesetaraan sosial yaitu pengguna produk hukum dari DJKN/KPKNL mendapatkan kepastian hukum atas produk hukum yang dikeluarkan oleh DJKN/KPKNL tanpa memandang status sosial, gender, maupun disabilitas.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, capaian indikator kinerja ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi pengguna jasa DJKN/KPKNL, dan diharapkan masyarakat tidak ragu dalam menggunakan layanan dari DJKN/KPKNL, yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kenaikan PNBPN pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Menyusun alat bantu perhitungan Indeks Penanganan Permasalahan Hukum sesuai dengan manual IKU tahun 2026, yang diantaranya digunakan sebagai sarana monitoring penanganan perkara.
2. Memproses dan menyampaikan surat kuasa khusus dengan cepat sehingga tidak

mengganggu proses persidangan.

3. Melakukan pembinaan/sosialisasi/diskusi penanganan perkara.

Melakukan monitoring efektifitas kegiatan pembinaan dan menghimpun masukan dari KPKNL untuk perbaikan kegiatan/materi pembinaan selanjutnya.

8. Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 1 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif				120%
8a-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80	97,10	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (8a-CP) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko.

Indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Aspek pengukuran kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko antara lain:

	TW I Bagian I (20%)	TW II Bagian II (25%)	TW III Bagian III (25%)	TW IV Bagian IV (30%)
Manajemen Kinerja Organisasi	1) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi	1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW I	1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW II	1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW III
	2) Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW I	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW II	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja
	3) Kesesuaian Manual IKU Pimpinan Unit	3) Kualitas Laporan Kinerja TW I	3) Kualitas Laporan Kinerja TW II	3) Kualitas Laporan Kinerja TW III
				4) Edukasi Manajemen Kinerja Organisasi
Manajemen Kinerja Pegawai	1) Kelengkapan SKP unit	1) Kualitas penyusunan manual IKI dan SKP Komplemen TW II	1) Kelengkapan SKP Komplemen TW II	1) Kelengkapan SKP Komplemen TW III
	2) Kepatuhan penilaian perilaku TW I	2) Kepatuhan penilaian perilaku TW II	2) Kepatuhan penilaian perilaku TW III	2) Kepatuhan penilaian perilaku TW IV
	3) Kepatuhan pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW I	3) Kepatuhan penyusunan IPR TW I	3) Kepatuhan penyusunan IPR TW II	3) Kepatuhan penyusunan IPR TW III dan Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW IV
		4) Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW II	4) Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW III	4) Edukasi Manajemen Kinerja Pegawai
				5) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai
Manajemen Risiko	1) Penyusunan Profil dan Piagam Risiko	1) Kualitas Laporan Pemantauan TW I	1) Kualitas Laporan Pemantauan TW II	1) Kualitas Laporan Pemantauan TW III
	2) Dokumen penyusunan Profil Risiko dan Piagam Manajemen Risiko	2) Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW I	2) Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW II	2) Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW III
				3) Edukasi Manajemen Risiko
				4) Kapasitas Pengelola Risiko

Adapun formula perhitungan indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Pembobotan Capaian Tahunan	Trajectory	Nilai IKMR
1	Bagian I	20%	Triwulan I	Nilai Bagian I x 100%
2	Bagian II	25%	Triwulan II	(Nilai Bagian I x 20%/45%) + (Nilai Bagian II x 25%/45%)
3	Bagian III	25%	Triwulan III	(Nilai Bagian I x 20%/70%) + (Nilai Bagian II x 25%/70%) + (Nilai Bagian III x 25%/70%)
4	Bagian IV	30%	Triwulan IV	Sama dengan perhitungan Tahunan
Formula Realisasi IKU untuk:		Nilai IKMR (Realisasi IKU)		
1) Pimpinan Unit		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
2) Kepala Bidang KHI Kanwil / Kepala Seksi KI Kanwil / Kepala Seksi KI KPKNL / Kepala Subdit yang menangani Kinerja dan Risiko / Pelaksana		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
3) Kepala Bagian Umum Kanwil / Kepala Subbag Kepagawain Kanwil / Kepala Subbagian Umum KPKNL / Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat / Pelaksana		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 100%		
Nilai IKMR		Predikat		
90 ≤ X ≤ 100		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan sangat baik		
80 ≤ X < 90		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan baik		
70 ≤ X < 80		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan cukup baik		
50 ≤ X < 70		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan kurang baik		
< 50		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan tidak baik		

Adapun *trajectory* indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif (8a-N) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	98,42	97,49	97,49	98,34	98,34	97,10	97,10	97,10	
Capaian	123%	120,93%	121,86%	122,92%	122,92%	121,37%	121,37%	121,37%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	97,10
2024	85	-	-	-	-	95,48
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 maupun dalam dokumen perencanaan strategis DJKN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*

Indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko tidak *dicascading* kepada seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Namun demikian, pada KPKNL terdapat indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko, dengan rincian target dan realisasi dari tiap KPKNL adalah sebagai berikut:

No	KPKNL	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Denpasar	80	98,39	122.99%	120%
2	Singaraja	80	96,73	120.91%	120%
3	Mataram	80	97,22	121.53%	120%
4	Bima	80	97,91	122.39%	120%
5	Kupang	80	96,20	120.26%	120%

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan

Risiko tahun 2025, telah dilakukan *extra effort* yaitu membentuk tim pengelola kinerja yang terdiri dari PIC masing – masing bidang/bagian yang mengampu IKU pada kontrak kinerja. Masing – masing PIC kinerja juga diwajibkan memiliki kualifikasi kompetensi pengelolaan kinerja. Bagi PIC yang belum memiliki kualifikasi kompetensi kinerja, disarankan untuk mengikuti *e-learning* pengelolaan kinerja melalui klc2.kemenkeu.go.id. Dengan mengikuti *e-learning* maka diharapkan para PIC kinerja dari tiap bidang memiliki pemahaman dasar tentang pengelolaan kinerja dan *update* tentang ketentuan pengelolaan kinerja terbaru.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membentuk tim pengelola kinerja dan pengelola risiko pada awal tahun 2025.
2. Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja pada awal tahun 2025.
3. Penyusunan profil risiko dan rencana mitigasi risiko pada awal tahun 2025.
4. Pelaksanaan rapat dialog kinerja individu oleh para atasan langsung (pejabat eselon III kebawah) setiap bulan.
5. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi (DKO) setiap bulan.
6. Pelaksanaan rapat dialog kinerja organisasi dan risiko (DKRO) setiap triwulan.
7. Tertib administrasi dan pelaporan manajemen kinerja dan risiko.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terkait pengelolaan kinerja dan risiko di internal Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja tersebut. Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan lainnya, sehingga secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indeks kualitas manajemen kinerja dan pegawai diantaranya adalah:

1. Penyediaan sheet kolaborasi yang digunakan oleh para PIC kinerja pada tiap bidang/bagian untuk menyampaikan data capaian kinerja terkini untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PIC kinerja organisasi.
2. Pelaksanaan one on one meeting dengan tiap bidang/bagian guna penyusunan profil risiko dan rencana aksi mitigasi risiko.
3. Penyediaan sharing folder bersama guna pendokumentasian capaian kinerja individu dan bukti dukung untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PIC kinerja pegawai.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 13. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko untuk menurunkan kemungkinan keterjadiannya, di antaranya dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi bulanan, melaksanakan monitoring dan evaluasi risiko triwulanan, serta mendokumentasikan kegiatan tersebut. Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi turun pada level 10.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Kurangnya pemahaman pegawai dalam pelaksanaan manajemen kinerja individu, khususnya mengenai kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan.
2. Lambatnya informasi mengenai realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja tertentu yang capaiannya diukur berdasarkan penilaian dari pihak eksternal.
3. Terdapat pengukuran IKU yang perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan kinerja dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan langkah – langkah diantaranya:

1. Penyampaian jadwal kegiatan dan *to-do list* manajemen kinerja individu kepada tiap pegawai.
2. Koordinasi dengan PIC dari kantor pusat yang menangani pengukuran kinerja dari pihak eksternal.
3. Memberikan masukan refinement IKU dan manual IKU ke kantor pusat DJKN guna meningkatkan keandalan dan keakuratan pengukuran kinerja.

Analisis keterkaitan dengan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Indikator kinerja ini telah mengakomodir isu GEDSI yaitu dengan penyelenggaraan rapat monev capaian kinerja, pelaporan kinerja individu maupun organisasi, serta dan pendokumentasian bukti dukung secara online. Sehingga seluruh pegawai Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara memiliki akses yang sama dalam manajemen kinerja dan risiko, tanpa membedakan unsur gender, disabilitas, maupun inklusi sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas Presiden

Indikator kinerja ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Namun demikian, manajemen kinerja dan risiko yang baik berkontribusi dalam mengawal IKU yang terkait dengan kenaikan PNBPN pada APBN, yang penggunaannya diantaranya untuk pelaksanaan program prioritas presiden.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada tahun 2026 tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Membentuk tim pengelola kinerja dan pengelola risiko pada awal tahun 2026.
2. Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja pada awal tahun 2026.
3. Penyusunan profil risiko dan rencana mitigasi risiko pada awal tahun 2026.
4. Melakukan pengelolaan kinerja dan risiko dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2026.

B. Realisasi Anggaran

DIPA Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.824.379.000,00. Selanjutnya setelah adanya revisi, blokir, dan efisiensi, pagu revisi (pagu neto) yang dapat digunakan adalah sebesar Rp3.082.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.021.775.178,00. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp61.104.822,00.

Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
Belanja pegawai	-	-	0%
Belanja barang	2.479.425.000	2.425.374.478	97,82%
Belanja modal	603.455.000	596.400.700	98,83%
Total	3.082.880.000	3.021.775.178	98,02%

Pagu dan realisasi belanja pegawai tidak ada pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dikarenakan belanja pegawai dilakukan secara terpusat oleh Kantor Pusat DJKN / Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Finansial

DIPA Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.824.379.000,00. Selanjutnya setelah adanya revisi, blokir, dan efisiensi, pagu revisi (pagu neto) yang dapat digunakan adalah sebesar Rp3.082.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.021.775.178,00. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp61.104.822,00.

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Revisi	Realisasi	Persen
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	7.892.000	7.597.857	96,27
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	10.134.000	10.134.000	100,00
3	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	6.642.000	4.200.000	63,23
4	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	262.537.000	257.093.432	97,93
5	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	23.202.000	17.462.000	75,26
6	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	61.505.000	57.741.203	93,88
7	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	42.924.000	33.271.200	77,51
8	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	27.240.000	27.240.000	100,00

9	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	32.416.000	32.122.500	99,09
10	Rekomendasi Hasil Penilaian	82.272.000	80.689.872	98,08
11	Penggalan Potensi Lelang	29.888.000	29.888.000	100,00
12	Aset BUN yang Dikelola	556.042.000	544.167.271	97,86
13	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	9.104.000	9.104.000	100,00
14	Layanan Bantuan Hukum	19.768.000	18.803.600	95,12
15	Kerumahtanggaan	121.117.000	118.869.356	98,14
16	Layanan Perkantoran	1.157.290.000	1.153.776.526	99,70
17	Peralatan Fasilitas Perkantoran	176.655.000	169.652.300	96,04
18	Kendaraan Bermotor	426.800.000	426.748.400	99,99
19	Kehumasan	17.422.000	13.121.900	75,32
20	Rekomendasi Kepatuhan Internal	12.030.000	10.091.761	83,89
	Total	3.082.880.000	3.021.775.178	98,02

Dari uraian tersebut diatas, secara umum terdapat efisiensi karena target kinerja yang diberikan dapat dipenuhi dengan NKO lebih dari 100 persen.

2. Efisiensi Penggunaan Barang Milik Negara

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara berkedudukan di kompleks Gedung Keuangan Negara I Denpasar, dimana dalam kompleks tersebut juga terdapat KPKNL Denpasar, KPPN Denpasar, Kanwil DJPB Provinsi Bali, dan KPTIK BMN Denpasar. Dengan demikian, secara umum terdapat efisiensi penggunaan BMN terkait sarana dan prasarana umum, misalnya tempat parkir tamu, tempat ibadah (pura dan musholla), APT difabel, dan petugas keamanan.

D. Kinerja Lain - Lain

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai bagian dari Kemenkeu Satu Bali, menjadi salah satu instansi yang memberikan pemaparan terkait Pengelolaan Barang Milik Negara serta Lelang Negara dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan para mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2025, bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara I Denpasar ini, Kabid Lelang Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan tentang optimalisasi aset negara, capaian kinerja, serta kontribusi PNPB yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa mengenai fungsi dan kontribusi DJKN serta unit-unit Kementerian Keuangan lainnya dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

E. Evaluasi dan Peningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2025 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan metode sampling. Pada tahun 2025, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara selaku unit kerja tidak termasuk dalam unit yang dijadikan sampel.

Adapun KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang dijadikan sampel adalah KPKNL Denpasar dan KPKNL Singaraja.

Adapun upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, selaku Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) serta Kepala Seksi Kepatuhan Internal selaku Administrator Kinerja Organisasi (AKO), adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pengelola Kinerja dan Risiko, yang terdiri dari perwakilan dari tiap bagian/bidang pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
2. Memastikan seluruh anggota tim pengelola kinerja dan risiko memiliki kompetensi terkait dengan pengelolaan kinerja. Untuk anggota yang belum memiliki sertifikat pelatihan/diklat terkait pengelolaan kinerja diwajibkan untuk mengikuti *e-learning* pengelolaan kinerja pada KLC Kemenkeu.
3. Penyusunan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada awal tahun (Januari 2025) dan diikuti dengan penyusunan SKP jajaran dibawahnya, sebagai dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
4. Pelaksanaan rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap triwulan serta pelaksanaan rapat Monev Capaian Kinerja (Monev Capkin) bulanan yang melibatkan seluruh bidang/bagian pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
5. Pembuatan dashboard Kepatuhan Internal pada tautan <https://bit.ly/dashboardKIKanwilDJKNBalnus> (akses internal) yang salah satu menunya terkait dengan pengelolaan kinerja dan risiko.

Selain itu, komitmen Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja tercermin dalam kehadiran dalam rapat DKO dan Monev Capkin, diantaranya dengan memberikan arahan, mengikuti jalannya diskusi, serta memberikan arahan terkait hal – hal yang perlu diperhatikan terkait pencapaian realisasi kinerja.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau Sasaran Strategis Tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2025, seluruh jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan perencanaan dan pelaksanaan kinerja dengan cermat, mengidentifikasi akar masalah, menetapkan rencana aksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Hal tersebut telah menghasilkan NKO sebesar 116,33, naik dibandingkan NKO tahun 2024 yang sebesar 115,49. Adapun target yang dilakukan adendum menjadi lebih tinggi juga merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan.

Guna menjaga kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tetap optimal pada tahun 2026, perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kinerja dengan cermat, berintegritas, dan optimal.
2. Monitoring capaian kinerja dan rapat dialog kinerja organisasi dan risiko secara rutin.
3. Koordinasi dengan KPKNL, kantor pusat DJKN, serta instansi lain.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, sehingga dapat memberikan feedback guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

SS.1	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.1	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya
1b-CP	Indeks Integritas

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa
3b-N	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa
3c-N	Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif
4a-CP	Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif
5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif
6a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif
6b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif
6c-N	Indeks tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif
7b-N	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v

SS.8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2.	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan/atau Renja 2025	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10.	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi e-sakip	v
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-23/KN/2025

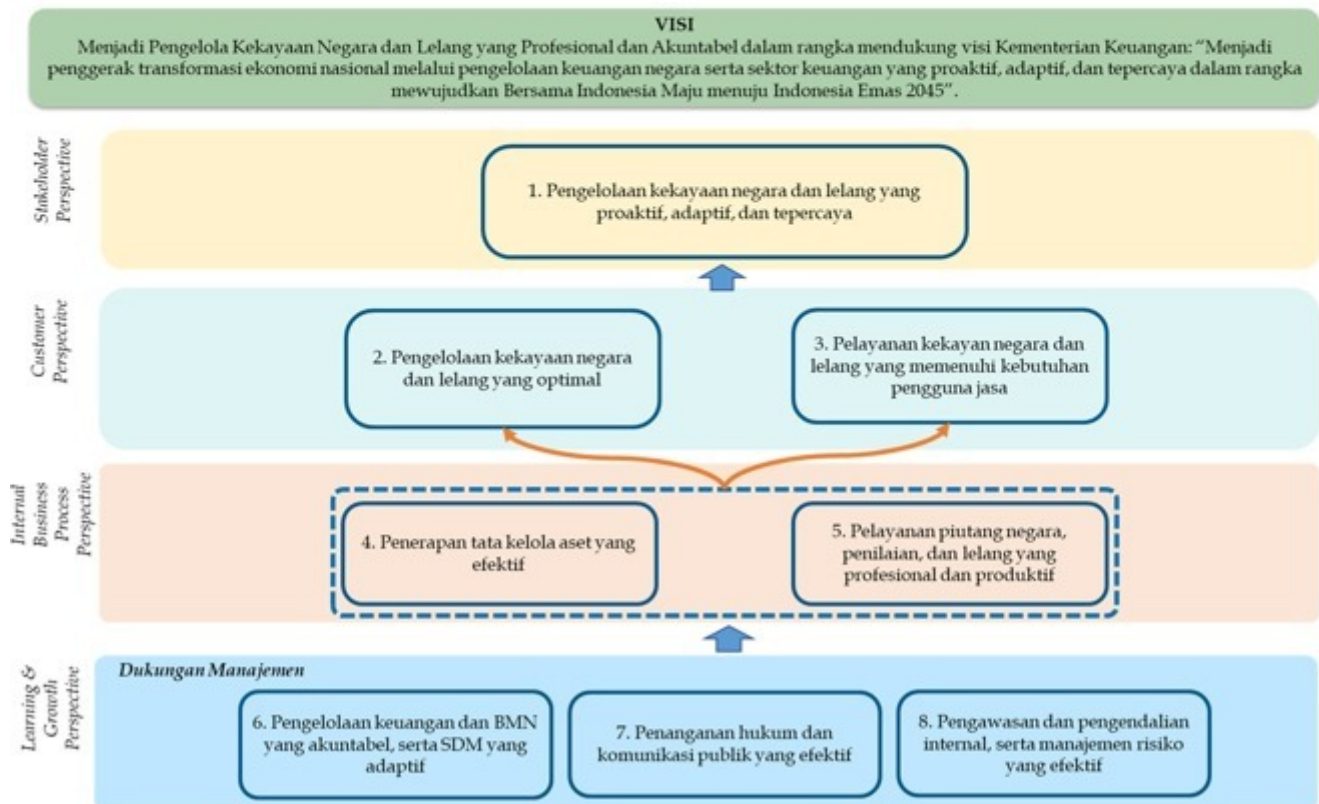
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp101,02 M)
		1b-CP	Indeks integritas	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp1,9 T)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp14,3 M)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Anggaran

Rp1,526,907,000



Kegiatan

- | | |
|--|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp133,476,000 |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp411,809,000 |
| 3. Pengelolaan Aset | Rp963,414,000 |
| 4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp18,208,000 |

Program:

Program Dukungan Manajemen	Rp2,021,435,000
----------------------------	-----------------

Kegiatan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp19,768,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp1,901,661,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp38,014,000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp61,992,000 |

Kota Denpasar, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp101,02 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,9 T)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100% (Rp14,3 M)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Denpasar, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Denpasar, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Sударsono		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19691214 199603 1 002		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp101,02 M)	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp1,9 T)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp14,3 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	Kebutuhan Pengguna Jasa	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Denpasar, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Sudarsono

19691214 199603 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	188 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp101,02 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,9 T)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100% (Rp14,3 M)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Kota Denpasar, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Sudarsono

19691214 199603 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 23A/KN/2025

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-23/KN/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (101,02 M)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (111,80 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (1,9 T)	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (2,11 T)
3.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (14,3 M)	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (14,38 M)

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Denpasar, 17 November 2025

Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (101,02 M)	<i>Penerima Layanan</i>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi pokok lelang	100 (1,9 T)	<i>Penerima Layanan</i>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (14,3 M)	<i>Penerima Layanan</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (111,80 M)	<i>Penerima Layanan</i>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi pokok lelang	100 (2,11 T)	<i>Penerima Layanan</i>

Denpasar, 17 November 2025

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
TAHUN 2025**

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian (%)	Indeks Max. 120 (%)
	<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	127.89%	127.89	120.00
1b-CP	Indeks Integritas	100.00	105.32	105.32	105.32
	<i>Customer Perspective (20%)</i>				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	101.97%	101.97	101.97
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	135.64%	135.64	120.00
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	140.93%	140.93	120.00
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95.82	124.44	120.00
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	127.49	172.28	120.00
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	84.15	120.21	120.00
	<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif				
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	117.95%	117.95	117.95
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120.00%	120.00	120.00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	116.60%	116.60	116.60
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	120.59%	172.27	120.00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	122.01%	152.51	120.00
	<i>Learning and Growth Perspective (25%)</i>				
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120.00	120.00
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	100.00%	125.00	120.00
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125.22	125.22	120.00
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	6.60	185.92	120.00
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100.00	115.01	115.01	115.01
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80.00	97.10	121.38	120.00

Jumlah anggaran tahun 2025 = Rp3.824.379.000,00

Jumlah anggaran neto tahun 2025 = Rp3.082.880.000,00

Jumlah realisasi anggaran tahun 2025 = Rp3.021.775.178,00

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-12
 Kementerian Negara/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon 1 : 015.09 - DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah/Provinsi : 22.51 - KOTA DENPASAR/BALI
 Satuan Kerja : 538051 - KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 06-01-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	3,824,379,000.00	3,021,775,178.00	79.01%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	3,824,379,000.00	3,021,775,178.00	79.01%							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	1,526,907,000.00	1,110,711,335.00	72.74%							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	133,476,000.00	21,931,857.00	16.43%							
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	133,476,000.00	21,931,857.00	16.43%							
001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	48,444,000.00	7,597,857.00	15.68%	122.0000	Orang	122.0000	100%	84.32%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	42,624,000.00	10,134,000.00	23.78%	107.0000	Orang	107.0000	100%	76.22%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	42,408,000.00	4,200,000.00	9.9%	107.0000	Orang	107.0000	100%	90.1%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	411,809,000.00	332,296,635.00	80.69%							
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	411,809,000.00	332,296,635.00	80.69%							
001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	305,050,000.00	257,093,432.00	84.28%	1.0000	Rekomendasi	1.0000	100%	15.72%	(00)	-

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	44,254,000.00	17,462,000.00	39.46%	1.0000	Rekomendasi	1.0000	100%	60.54%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
003	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	62,505,000.00	57,741,203.00	92.38%	8.0000	Rekomendasi	8.0000	100%	7.62%	(00)	-
4798	Pengelolaan Aset	963,414,000.00	747,378,843.00	77.58%							
AAH	Peraturan lainnya	43,572,000.00	33,271,200.00	76.36%							
001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	43,572,000.00	33,271,200.00	76.36%	3.0000	Surat Keputusan	3.0000	100%	23.64%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	130,056,000.00	27,240,000.00	20.94%							
004	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	104,080,000.00	27,240,000.00	26.17%	84.0000	Orang	84.0000	100%	73.83%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
005	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	25,976,000.00	0.00	0%	1.0000	Orang	1.0000	100%	100%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	233,744,000.00	142,700,372.00	61.05%							
004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	32,416,000.00	32,122,500.00	99.09%	2.0000	Rekomendasi	2.0000	100%	0.91%	(00)	-
005	Rekomendasi Hasil Penilaian	82,272,000.00	80,689,872.00	98.08%	3.0000	Rekomendasi	3.0000	100%	1.92%	(00)	-
007	Penggalian Potensi Lelang	119,056,000.00	29,888,000.00	25.1%	4.0000	Rekomendasi	4.0000	100%	74.9%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
FAK	Pengelolaan Aset BUN	556,042,000.00	544,167,271.00	97.86%							
001	Aset BUN yang Dikelola	556,042,000.00	544,167,271.00	97.86%	11.0000	Aset	11.0000	100%	2.14%	(00)	-
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	18,208,000.00	9,104,000.00	50%							
ACE	Perizinan Profesi	18,208,000.00	9,104,000.00	50%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
001	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	18,208,000.00	9,104,000.00	50%	8.0000	Orang	8.0000	100%	50%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
WA	Program Dukungan Manajemen	2,297,472,000.00	1,911,063,843.00	83.18%							
4700	Legislasi dan Litigasi	19,768,000.00	18,803,600.00	95.12%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19,768,000.00	18,803,600.00	95.12%							
969	Layanan Bantuan Hukum	19,768,000.00	18,803,600.00	95.12%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	4.88%	(00)	-
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,177,698,000.00	1,869,046,582.00	85.83%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,413,088,000.00	1,272,645,882.00	90.06%							
002	Kerumahahtagaan	152,638,000.00	118,869,356.00	77.88%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	22.12%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
994	Layanan Perkantoran	1,260,450,000.00	1,153,776,526.00	91.54%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	8.46%	(00)	-
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	764,610,000.00	596,400,700.00	78%							
001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	337,810,000.00	169,652,300.00	50.22%	30.0000	Unit	30.0000	100%	49.78%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
003	Kendaraan Bermotor	426,800,000.00	426,748,400.00	99.99%	2.0000	Unit	2.0000	100%	0.01%	(00)	-
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	38,014,000.00	13,121,900.00	34.52%							
BMB	Komunikasi Publik	38,014,000.00	13,121,900.00	34.52%							
002	Kehumasan	38,014,000.00	13,121,900.00	34.52%	12.0000	Kegiatan	12.0000	100%	65.48%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	61,992,000.00	10,091,761.00	16.28%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	61,992,000.00	10,091,761.00	16.28%							
001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	61,992,000.00	10,091,761.00	16.28%	5.0000	Dokumen	5.0000	100%	83.72%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-



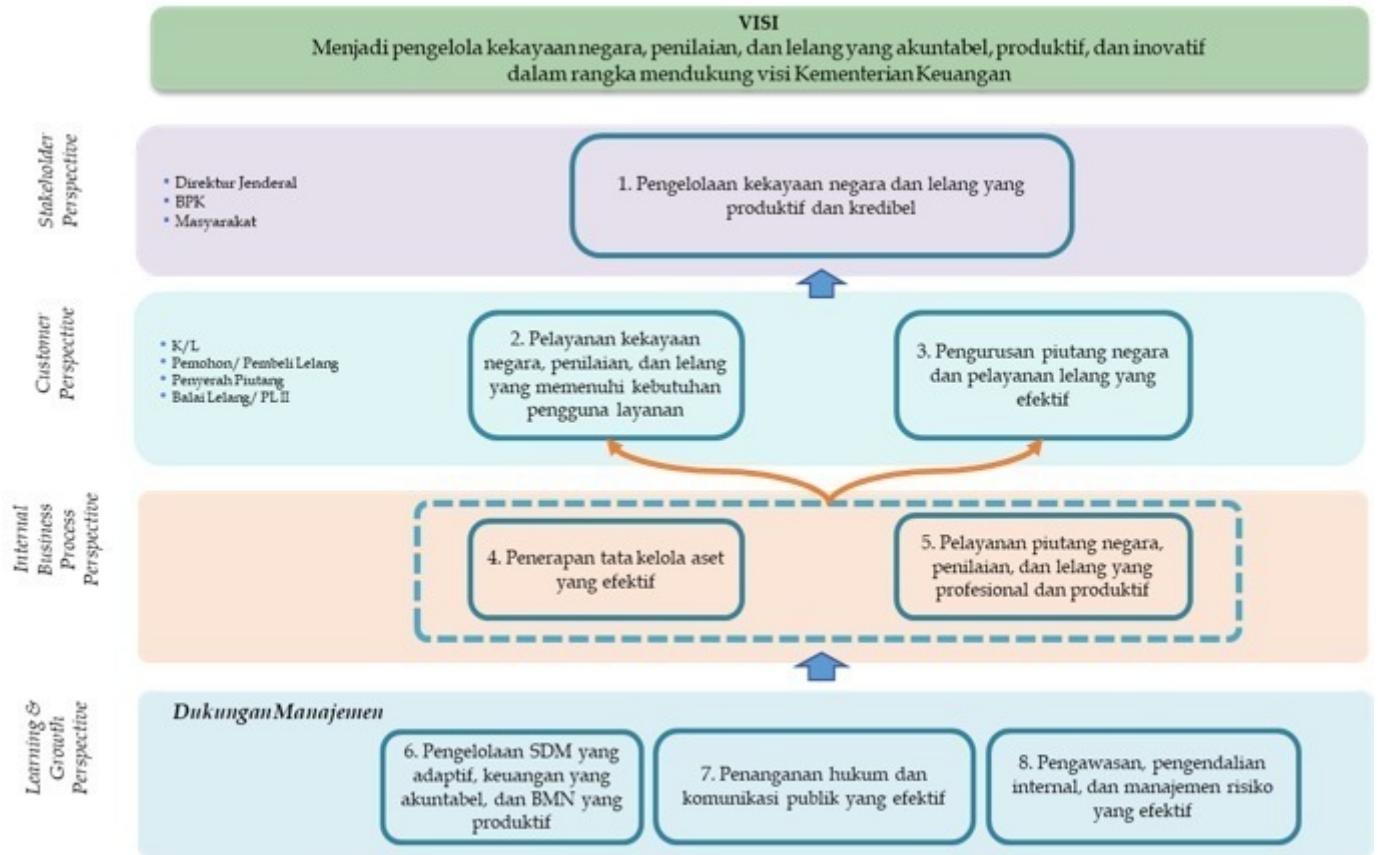
**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-23/KN/2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp98,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp5,5 M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp1,1 T)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Anggaran

Rp1,418,054,000



Kegiatan

- | | |
|--|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp127,903,000 |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp449,484,000 |
| 3. Pengelolaan Aset | Rp831,563,000 |
| 4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp9,104,000 |

Program:

Program Dukungan Manajemen	Rp1,215,320,000
----------------------------	-----------------

Kegiatan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp21,971,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp1,122,867,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp42,783,000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp27,699,000 |

Denpasar, Januari 2026

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp98,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,5 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,1 T)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	penilaian							
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Denpasar, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Denpasar, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Sударsono		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19691214 199603 1 002		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp98,4 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
		Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp5,5 M)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp1,1 T)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Denpasar, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sudarsono

19691214 199603 1 002



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	191 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp98,4 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,5 M)



3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	(Rp1,1 T)
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%	
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100	
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80	
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80	
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80	
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100	
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83	
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Denpasar, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Sudarsono

19691214 199603 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026

